

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
DALAM MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA
DI KABUPATEN BARRU**



Oleh :

IDALAL
A 111 99 047

Nama	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. Pengantar	22-3-2005
Aspek	Fak: Ekonomi
Sampel	1 Ek
Halaman	hadiah
No. Registrasi	0502/3-31r
Biaya	24840 -

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2005

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
DALAM MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA
DI KABUPATEN BARRU**



IDALAL

A 111 99 047

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai
Gelara Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Makassar*

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Hamid'.

DRS. H. ABDUL HAMID PADDU, MA

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Jibril'.

IR. MUH. JIBRIL TAJIBU, SE, M.Si

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, Rabb sekalian alam serta salawat dan salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dan segenap keluargaNya, karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Barru”** guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak melibatkan berbagai pihak yang memberikan berbagai bantuan baik langsung maupun tidak langsung, berupa pikiran serta petunjuk-petunjuk sehingga penulisan ini dapat terselesaikan sebagaimana adanya.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Drs. H. Abd. Hamid Paddu, MA** selaku *pembimbing I* dan Bapak **Ir. Muh. Jibril Tajibu, SE, M.Si** selaku *pembimbing II*, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan dorongan, pengarahan serta petunjuk-petunjuk yang sangat membantu dan besar manfaatnya bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak **Drs. Taslim Arifin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unhas dan Bapak **Drs. H. Abd. Hamid Paddu, MA** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Unhas.
2. Bapak **Drs. Tadjuddin Parenta, MA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE-UH dan Bapak **Drs. Anas Iswanto Anwar, MA** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE-UH.

3. Bapak **Drs. A. Kahar Akil, MS** selaku penasehat akademik yang telah senantiasa mengarahkan penulis dalam semua kegiatan akademik selama menempuh perkuliahan.
4. Seluruh dosen yang telah membimbing dan membekali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini, khususnya **Pa' Jamal, Pa' Adi, Pa' Parman, Pa' Ical Pa' Malik dan K' Aty**.
6. Pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Barru serta Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru.


Akhirnya dengan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan hati terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun yang berguna bagi kesempurnaan skripsi ini, dan penulis harapkan agar skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang berkepentingan.

Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya atas semua bantuan yang telah diberikan. Amien...

Makassar, Maret 2005

Penulis

J d a l a l



*Skripsi ini kupersembahkan
sebagai kado spesial
sekedar ungkapan cinta dan kasih sayang
untuk :*

*Ayahanda H. Masjidin dan
Ibunda Hj. Arifah
yang selama ini merawatku, membesarkanku
dengan jerih payahnya
dan doa-doanya dan kasih sayang yang tiada henti...
serta kakakku Muh. Iqbal yang telah banyak
memberikan motivasi dan dukungan baik
yang bersifat moril maupun
yang bersifat materiil kepada penulis.
Tanpa bantuan kalian
aku tidak akan bisa
seperti ini.*

♥ Special thanx for my sweet friends Sharee,SE, Uphe,SE, Ihufu,SE,(terima kasih atas supportnya yang tiada henti) Isa,SE (entah di mana?), fadhho,SE (dah dapat kerja blom??), Suri, Thia (semangat yaa!!!...Insya Allah kalian akan mendapat giliran), Jusna,SE, Mimi,SE, Indah,SE, Edy, SE,(Akhirnya... saat yang kita nantikan datang juga) kalian adalah teman2 terbaikku yang telah banyak memberikan dorongan...kasih sayang dalam kebersamaan kita selama ini takkan pernah terlupakan.

♥ Teman2 seperjuangan SP 99 : Steve,SE, Alam,SE,(terima kasih ya.. atas bantuannya selama ini, mudah-mudahan Tuhan membalasnya)Ichal, Fachri, Junaedy, Gerson (Urus itu Skripsi ... supaya cepat kelar),Yuli, Atut,SE, Herman,SE, Kurniawan,SE Amir,SE, Ady,SE, en yang tidak tersebutkan, serta para Senior 'n Yuniior yang tidak bisa kusebut namanya satu persatu, bukan berarti aku melupakan kalian.

♥ Sahabat setiaku yang tak bosan-bosannya mendengarkan keluh kesahku Ana (kapan ya..kita bisa ketemu lagi??), Crew Pondok 56: Mhia,SE (kangen banget ama guyon kamu), Chinta (hidup memang sebuah pilihan), Warda A.md, Bunda/Eni A,MD, Lina A.md(Usaha dong cari kerja, jangan cuma cowok yang diurusin), Zul,ST,(kalau memang suka bilang aja..ntar diambil orang baru tau rasa loe). Arnhi, Marhi, Mhal, Wiwie, andha, Yasin(rajin-rajin kuliah ya..biar cepet selesai),
Aku hanya ingin bilang thanx atas bantuan, kasih sayang dan kebersamaannya selama ini, yang akan selalu jadi kenangan manis dan takkan pernah terlupakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Pembahasan	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengeluaran Pemerintah.....	6
2.2 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	9
2.3 PDRB	16
2.4 Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja.....	19
2.5 Teori-Teori Kesempatan Kerja	22
2.6 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Kesempatan Kerja	29
2.7 Hipotesis	36
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Kerangka Pemikiran	37
3.2 Jenis dan Sumber Data	38
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.4 Model Analisis	39
3.5 Batasan Variabel	42

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Letak Geografis	44
4.2	Penduduk dan Tenaga Kerja	46
4.3	Perekonomian Daerah	48

BAB V. PEMBAHASAN

5.1	Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 1992/1993-2002	55
5.2	PDRB Kabupaten Barru Tahun 1993-2003	61
5.3	Kesempatan Kerja Kabupaten Barru Tahun 1993-2003	64
5.4	Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap PDRB Di Kabupaten Barru Tahun 1993/1994-2003	70
5.5	Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap PDRB Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Barru Tahun 1993/1994-2003	72

BAB VI. PENUTUP

6.1	Kesimpulan	76
6.2	Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	12
Gambar 2.2	Teori Peacock Dan Wiserman.....	14
Gambar 2.3	Keseimbangan Dan Ketidakseimbangan Antara Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja	22
Gambar 2.4	Kurva Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Menurut Teori Klasik.....	25
Gambar 2.5	Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja Menurut Teori Keynes	27
Gambar 2.6	Kebijakan Fiskal Ekspansif Dalam Model IS-LM.....	30
Gambar 2.7	Perluasan Kebijakan Fiskal Dan Penyesuaian Moneter.....	34
Gambar 3.1	Skema Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah, PDRB Dan Kesempatan Kerja	38
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Barru	45
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Menurut Sektor Tahun 2001-2003	49
Gambar 4.3	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Barru Tahun 1999-2003	51
Gambar 4.4	Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Barru Tahun 1999-2003, Atas Dasar Harga Konstan ..	53
Gambar 5.1	Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Barru Periode 1992/1993-2002	57

Gambar 5.2	Perkembangan PDRB Kabupaten Barru Periode 1993-2003.....	62
Gambar 5.3	Perkembangan Kesempatan Kerja Kabupaten Barru Periode 1993-2003	66
Gambar 5.4	Presentase Pekerja Di Kabupaten Barru Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003	67

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Dan Jumlah Kelurahan Atau Desa Setiap Kecamatan Di Kabupaten Barru	46
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Di Kabupaten Barru.....	47
Tabel 4.3	Perkembangan PDRB Sulawesi Selatan Dan PDRB Kabupaten Barru Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1999-2002	52
Tabel 5.1	Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Barru Tahun 1993-2003.....	65

DAFTAR LAMPIRAN



- Lampiran 1 Hasil Analisis Least Square Dengan Menggunakan Program Eviews Ver 3.1
- Lampiran 2 Hasil Analisis 2SLS (Two Stage Least Square) Dengan Menggunakan Program Eviews Ver 3.1
- Lampiran 3 Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Barru Menurut Sektor Tahun 1992-2002
- Lampiran 4 PDRB Kabupaten Barru Tahun 1993-2003 Atas Dasar Harga Konstan
- Lampiran 5 Penduduk Kabupaten Barru Yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 1993-2003
- Lampiran 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003
- Lampiran 7 Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, Perkembangan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) Dan Perkembangan Kasempatan Kerja.
- Lampiran 8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Menurut Sektor Tahun 2001-2003 Dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barru Tahun 1999-2003
- Lampiran 9 Distribusi Persentase Pdrb Kabupaten Barru Menurut Lapangan Usaha Tahun 1999-2003 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (%) Dan Presentase Pekerja Di Kabupaten Barru Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah perekonomian negara-negara di dunia, masalah stabilisasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian suatu negara tidak pernah luput dari masalah ketidakstabilan ekonomi termasuk negara Indonesia, demikian pula dengan Kabupaten Barru yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari wilayah Indonesia tidak luput dari masalah tersebut. Salah satu penyebab ketidakstabilan ekonomi tersebut adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jika ketidakstabilan ekonomi tersebut terus berlanjut, maka akan timbul masalah-masalah seperti inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pengangguran yang tinggi.

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan berbagai implikasi ataupun tekanan dalam berbagai bidang pembangunan, salah satu diantaranya adalah masalah penyediaan kesempatan kerja karena bila jumlah penduduk bertambah, maka akan menyebabkan jumlah angkatan kerja bertambah berarti masalah bagi penyediaan lapangan kerja yang baru.

Kesempatan kerja dan jumlah serta kualitas orang yang digunakan dalam pekerjaan mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan. Hal ini bukan hanya karena tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan, akan tetapi juga

karena pekerjaan merupakan sumber-sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Pendapatan ini selanjutnya akan dapat menimbulkan pasar yang cukup besar di dalam negeri dan inilah yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat secara terus menerus dalam jangka panjang. Oleh karenanya perluasan kesempatan kerja harus dimasukkan dalam strategi pembangunan. Hal ini diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi.

Penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2001 tercatat sekitar 153697 jiwa, selanjutnya pada tahun 2003 bertambah menjadi 159316 jiwa. Dengan kata lain, laju pertumbuhan penduduk periode 2001-2003 sekitar 3,66%. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Barru terus meningkat setiap tahunnya diikuti dengan jumlah pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah pencari kerja pada tahun 2001 sebanyak 3740 orang dan pada tahun 2003 naik menjadi 3818 orang. Jumlah pencari kerja yang terus meningkat ini menuntut tersedianya lapangan kerja.

Dengan kondisi seperti ini, maka perencanaan masalah penduduk dan ketenagakerjaan harus menjadi perhatian yang kontinyu. Pemerintah dan seluruh aparat yang terkait harus jeli melihat berbagai persoalan yang muncul, setidaknya semua yang berkaitan dengan persoalan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan untuk pembangunan ke depan. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan karena kedua faktor ini di duga mempunyai pengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (1990) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam hal ini anggaran pembangunan daerah yang

dikategorikan sebagai pengeluaran pembangunan, pada dasarnya merupakan investasi dari pemerintah untuk ikut mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB. Sedangkan pertumbuhan jumlah pekerja di satu sektor adalah akibat dari pertumbuhan nilai produksi nyata di sektor tersebut, dengan kata lain angkatan kerja akan terserap oleh pertumbuhan ekonomi (Ananta dan Tjiptoherijanto, 1988). Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih judul :

“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Barru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah (pengeluaran pembangunan) terhadap PDRB di Kabupaten Barru tahun 1993/1994-2003.
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah (pengeluaran pembangunan) dalam menciptakan kesempatan kerja melalui PDRB di Kabupaten Barru tahun 1993/1994-2003.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh pengeluaran pemerintah (pengeluaran pembangunan) terhadap PDRB di Kabupaten Barru tahun 1993/1994-2003.
2. Untuk memahami dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah (pengeluaran pembangunan) dalam menciptakan kesempatan kerja melalui PDRB di Kabupaten Barru tahun 1993/1994-2003.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan anggaran pengeluaran agar benar-benar mencerminkan kegiatan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau bahan pembandingan bagi peminat penelitian selanjutnya, baik dalam topik dan obyek yang sama maupun dalam topik dan obyek yang berbeda dalam penelitian.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan yang akan dilakukan dapat lebih jelas dan mudah dipahami, maka sistematika pembahasannya sebagai berikut :

➤ **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

➤ BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengeluaran pemerintah, teori perkembangan pengeluaran pemerintah, PDRB, tenaga kerja dan kesempatan kerja, teori-teori kesempatan kerja, hubungan antara pengeluaran pemerintah, PDRB dan kesempatan kerja serta hipotesis.

➤ BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi kerangka pemikiran, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, model analisis dan batasan variabel.

➤ BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang letak geografis, penduduk dan tenaga kerja serta perekonomian daerah.

➤ BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan memaparkan tentang pengeluaran pembangunan Kabupaten Barru tahun 1992/1993-2002, PDRB Kabupaten Barru tahun 1993-2003, kesempatan kerja Kabupaten Barru tahun 1993-2003, pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap PDRB di Kabupaten Barru tahun 1993/1994-2003 dan pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap PDRB dalam menciptakan kesempatan kerja di Kabupaten Barru tahun 1993/1994-2003.

➤ BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran.

➤ BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengeluaran pemerintah, teori perkembangan pengeluaran pemerintah, PDRB, tenaga kerja dan kesempatan kerja, teori-teori kesempatan kerja, hubungan antara pengeluaran pemerintah, PDRB dan kesempatan kerja serta hipotesis.

➤ BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi kerangka pemikiran, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, model analisis dan batasan variabel.

➤ BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang letak geografis, penduduk dan tenaga kerja serta perekonomian daerah.

➤ BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan memaparkan tentang pengeluaran pembangunan Kabupaten Barru tahun 1992/1993-2002, PDRB Kabupaten Barru tahun 1993-2003, kesempatan kerja Kabupaten Barru tahun 1993-2003, pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap PDRB di Kabupaten Barru tahun 1993/1994-2003 dan pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap PDRB dalam menciptakan kesempatan kerja di Kabupaten Barru tahun 1993/1994-2003.

➤ BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Pada tingkat daerah pengeluaran pemerintah atau belanja daerah terdapat pada pos anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun biaya pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan optimalisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) secara efisien dan efektif, maka struktur anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2003 terjadi perubahan yakni disusun berdasarkan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil kinerja atau output dan bukan lagi pada input seperti kecenderungan sebelumnya.

Dalam struktur APBD yang baru, sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dan pinjaman (utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun dimasukkan sebagai pembiayaan daerah, sementara anggaran belanja rutin dan

anggaran belanja pembangunan yang ada pada struktur APBD sebelumnya diarahkan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal yang diklasifikasi dalam belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Dengan struktur yang baru tersebut akan lebih mudah mengetahui surplus atau defisit dari anggaran dan pendapatan belanja daerah, sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik). Jika terjadi defisit anggaran, untuk menutupinya disediakan pos tambahan yaitu pos pembiayaan.

Khusus bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan pemerintah pada umumnya selalu meningkat. Pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kemungkinannya akan mendorong produksi domestik (Anwar dalam Laly, 1991). Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini dapat kita lihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional.

Suparmoko (1999) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu sendiri. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Pengeluaran pemerintah ini dapat bersifat "*exhaustive*" yang merupakan pembelian barang-barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Disamping itu dapat pula bersifat "*transfer*"

saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial kepada perusahaan-perusahaan sebagai susidi dan mungkin pula kepada negara-negara lain sebagai hadiah.

Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

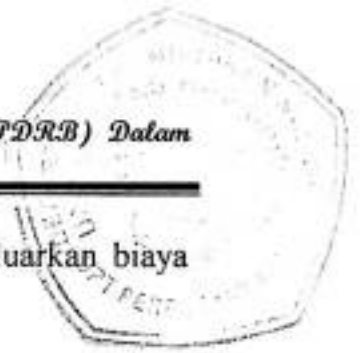
Menurut Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri (2003), pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang.
- b. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- c. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran masa mendatang.
- d. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang lebih luas.

Pengeluaran Negara Berdasarkan Sifatnya

Secara garis besar pengeluaran pemerintah berdasarkan sifatnya terbagi ke dalam:

- a) Pengeluaran yang bersifat *self-liquidating* yang mampu memberikan keuntungan, yakni pengeluaran negara yang berupa pemberian jasa kepada masyarakat, sehingga nantinya akan mendapat pembayaran kembali dari masyarakat atas barang atau jasa yang diberikan BUMN kepada masyarakat.



- Ini berarti dengan adanya BUMN, maka negara harus mengeluarkan biaya tetapi nantinya akan mendapat hasil juga.
- b) Pengeluaran yang bersifat reproduktif, yaitu pengeluaran yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan penghasilannya. Di lain pihak pemerintah akan menerima pendapatan juga misalnya dari retribusi dan pajak dari masyarakat.
 - c) Pengeluaran yang tidak produktif, misalnya pengeluaran untuk membuat monumen yang tidak menghasilkan pemasukan kembali. Pengeluaran untuk membiayai peperangan atau menumpas pemberontakan dan lain-lain.
 - d) Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang, misalnya untuk penyantunan anak yatim, kalau dimulai sejak dini biayanya lebih ringan daripada kalau terlambat.

2.2 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro (Mangkoesubroto dalam Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003).

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain:

1) Model pembangunan tentang pengeluaran pembangunan

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, peranan investasi swasta sudah semakin besar, namun investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas karena peranan swasta yang semakin besar banyak menimbulkan kegagalan pasar sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Disamping itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit (*complicated*). Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti

program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

2) Hukum Wagner

Berdasarkan pengamatan empiris dari negara-negara maju (USA, German, Jepang), Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat. Meskipun demikian, Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks.

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_K PP_1}{PPK_1} < \frac{P_K PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_K PP_n}{PPK_n}$$

Di mana :

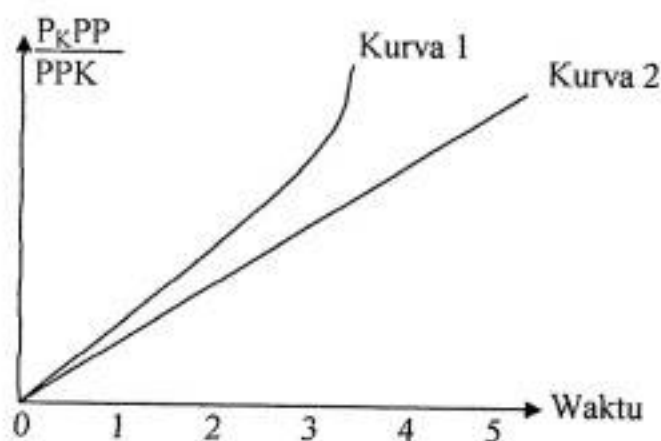
$P_K PP$ adalah pengeluaran pemerintah perkapita

PPK adalah pendapatan perkapita (GDP/Jumlah penduduk)

1,2,... n adalah jangka waktu tahun

Hukum Wagner juga ditunjukkan pada Gambar 2.1, di mana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh kurva 2.

Gambar 2.1
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner



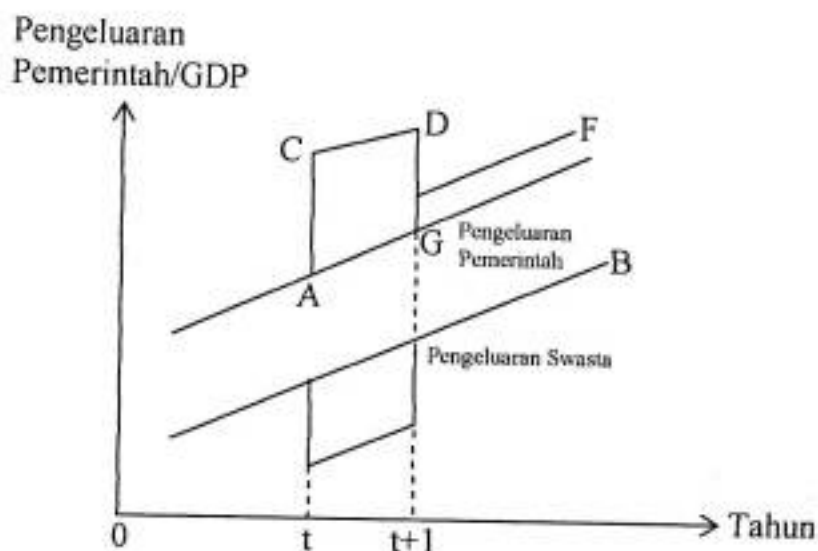
3) Teori Peacock dan Wiserman

Teori Peacock dan Wiserman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut teori Peacock dan Wiserman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah menaikkan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak, sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain. Setelah perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pajak pada tingkat sebelum adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah harus mengembalikan angsuran utang dan bunga pinjaman yang digunakan untuk membiayai perang, sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GNP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.2
Teori Peacock dan Wiserman



Dalam keadaan normal dari tahun t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam presentase GNP (atau GDP) naik sebagaimana ditunjukkan oleh garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah naik sebesar AC dan kemudian naik seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai (pada tahun $t+1$), pengeluaran pemerintah tidak turun ke G yaitu tingkat perkembangan pengeluaran pemerintah apabila tidak terjadi perang. Hal ini disebabkan karena setelah perang pemerintah memerlukan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan perang.

Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik sehingga interaksi

antara permintaan dan penawaran akan barang untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja.

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Penentuan permintaan

$$U_i = f(G, X)$$

Di mana:

- G = Vektor dari barang publik
- X = Vektor barang swasta
- i = Individu; $i = 1, \dots, n$
- U = Fungsi utilitas

Jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja akan menimbulkan permintaan barang lain. Misalnya pemerintah menetapkan akan membuat sebuah pelabuhan udara baru, pelaksanaan pembuatan pelabuhan udara tersebut menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta seperti semen, baja dan sebagainya.

2) Penentuan tingkat output

Barang dan jasa publik yang disediakan pemerintah ditentukan oleh politisi yang memilih jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Disamping itu, para politisi juga menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai barang dan jasa publik tersebut dalam menentukan jumlah

barang dan jasa yang akan disediakan. Para politisi memperhatikan selera atau keinginan masyarakat, agar masyarakat merasa puas dan tetap memilih mereka sebagai wakil masyarakat. Fungsi utilitas para politisi adalah sebagai berikut:

$$U^P = f(G, X, S)$$

Di mana:

- U^P = Fungsi utilitas
- G = Vektor barang Publik
- X = Vektor barang swasta
- S = Keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau pangkat/kedudukan

2.3 PDRB

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka akan diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat (Anonym ; 1994).

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan masyarakat pada tahun sebelumnya (Sukirno ; 1985)

Tolok ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga dan indikator lainnya seperti pemerataan pendapatan dan yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi adalah PDRB.

Salah satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian adalah mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Menurut BPS dalam indikator ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan bahwa PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi pada waktu tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB/PDRB. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB/PDRB antara lain:

1. PDB/PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDB/PDRB yang mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas tersebut.

2. PDB/PDRB dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*) artinya perhitungan PDB/PDRB hanya mencakup nilai produksi yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dana guna menghitung PDB/PDRB, memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau secara sederhana dapat diartikan sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Nilai PDRB ini dapat dihitung melalui tiga pendekatan:

- a. Segi produksi, PDRB merupakan jumlah *netto* atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- b. Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut sertanya proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- c. Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah dan lembaga swasta *non profit*. Investasi serta ekspor neto (ekspor dikurangi impor) biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Untuk kepentingan berbagai analisa makro masing-masing daerah, pada umumnya nilai PDRB dihitung berdasarkan dua macam harga yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku artinya PDRB dihitung berdasarkan tingkat harga pada tahun perhitungan atau jumlah nilai barang dan jasa (komoditi), pendapatan, pengeluaran yang sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Sementara PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang dihitung berdasarkan tingkat harga tertentu atau nilai barang dan jasa (komoditi), pendapatan, pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap. Hal ini terjadi karena harga barang dan jasa tidak selalu tetap atau berubah-ubah. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDRB yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan maka pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan tidak dipengaruhi perubahan harga dengan maksud untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil dan untuk menghindari pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga (inflasi).

Sedangkan dalam menelaah peranan sektor (kontribusi sektor terhadap PDRB) atau besarnya perekonomian daerah dipakai acuan PDRB atas dasar harga berlaku. Dengan maksud agar pengaruh kenaikan/penurunan produksi maupun harga menjadi bagian yang diperhitungkan.

2.4 Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, sebab tenaga kerja merupakan pelaksana atau penggerak pembangunan. Tenaga kerja

merupakan salah satu faktor penentu dalam proses produksi dan menjadi faktor produksi terpenting dibanding dengan faktor produksi lainnya seperti tanah, modal dan sumber-sumber daya lainnya karena manusialah yang mengubah faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang. Tenaga kerja mempunyai dua fungsi yaitu: pertama, sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi (barang dan jasa). Dan yang kedua, sebagai sarana untuk menimbulkan dan mengembangkan pasar.

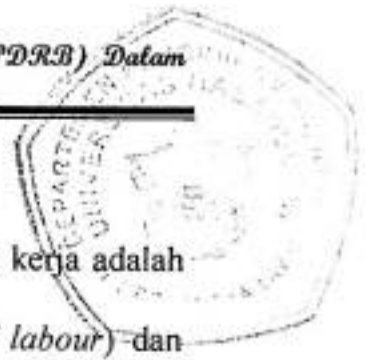
Tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang memiliki kemampuan untuk bekerja yang pada umumnya adalah penduduk yang berada pada kelompok usia kerja. Di dalam UU ketenagakerjaan tahun 1997, Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Definisi di atas mengandung maksud bahwa tenaga kerja tersebut mempunyai hubungan yang positif dengan kegiatan produksi karena sebagai sumber daya atau kekuatan yang dapat mendorong kapasitas produksi. Dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut, tenaga kerja meliputi semua orang yang sanggup atau mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa tanpa memandang pekerjaan dan batas usia.

Definisi lain tenaga kerja menurut Simanjuntak (1998), tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan

dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Jadi tidak terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, lanjut dikatakan bahwa setiap golongan yang bukan angkatan kerja walaupun sedang tidak bekerja, namun mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Mereka yang sedang mencari pekerjaan apabila ada permintaan tenaga kerja, maka dengan sendirinya mereka dapat masuk untuk mengisi lowongan tersebut. Begitupula mereka yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga sewaktu-waktu dapat masuk ke dalam pasar tenaga kerja, apabila mereka mau bekerja. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dapat dibedakan menurut batasan umur.

Pertumbuhan penduduk yang pesat akan berakibat pada meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja yang akan berimplikasi pada penyediaan kesempatan kerja. Jika jumlah tenaga kerja khususnya angkatan kerja lebih besar dari pada jumlah kesempatan kerja maka akan terjadi pengangguran. Begitupun sebaliknya, jika jumlah angkatan kerja lebih kecil dari jumlah kesempatan kerja maka jumlah pengangguran akan berkurang. Sehingga dapat dikatakan kesempatan kerja merupakan banyaknya lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana pendapat Simanjuntak (1998) yang menyatakan bahwa kesempatan kerja merupakan lapangan pekerjaan dan lowongan kerja yang tercipta untuk diisi melalui suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lowongan pekerjaan yang belum diisi.



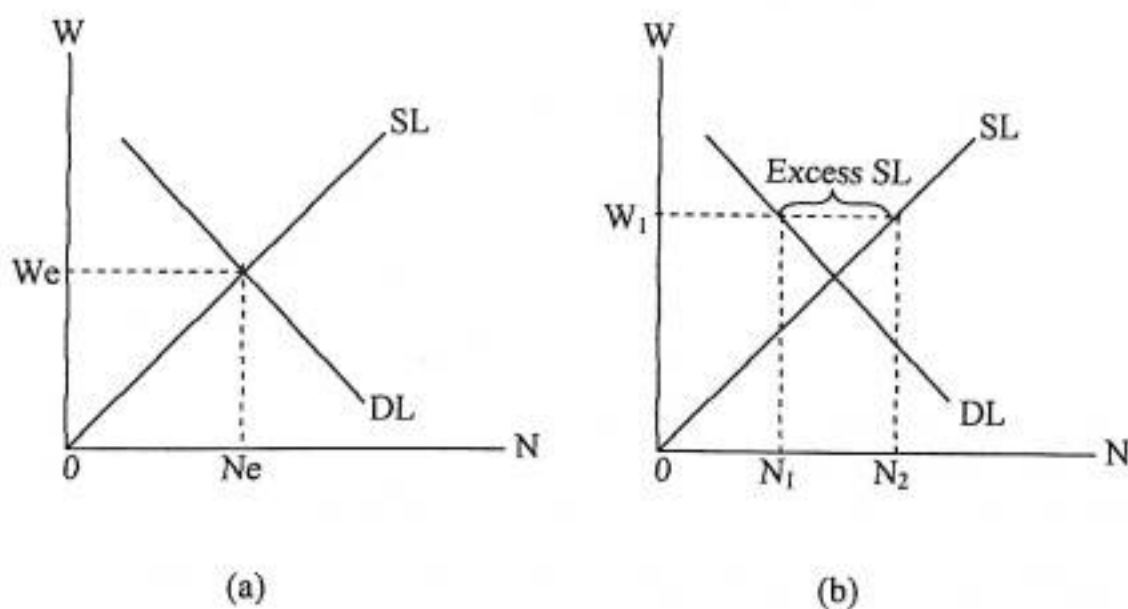
2.5 Teori-Teori Kesempatan Kerja

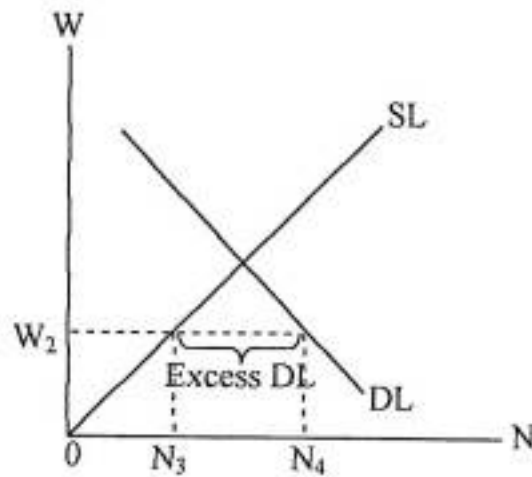
Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand of labour*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labour*) pada suatu tingkat upah (Mulyadi Subri, 2003). Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa:

- a) Lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labour*).
- b) Lebih besarnya permintaan dibanding penawaran terhadap tenaga kerja (adanya *excess demand of labour*).

Untuk mengetahui keseimbangan dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat dilihat pada kurva berikut:

Gambar 2.3
Keseimbangan dan ketidakseimbangan Antara
Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja





(c)

Keterangan :

- SL = Penawaran tenaga kerja (*supply of labour*)
- DL = Permintaan tenaga kerja (*demand of labour*)
- W = Upah riil
- N = Jumlah tenaga kerja
- Excess SL* = Kelebihan penawaran tenaga kerja
- Excess DL* = Kelebihan permintaan tenaga kerja

Pada Gambar bagian (a), jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta yaitu masing-masing sebesar N_e pada tingkat upah keseimbangan W_e . Dengan demikian titik keseimbangan berada pada titik E, di sini tidak ada *excess supply of labour* maupun *excess demand of labour*. Pada tingkat upah keseimbangan W_e maka semua orang

yang ingin bekerja telah dapat bekerja dan tidak ada orang yang menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut *full employment* pada tingkat upah W_e tersebut.

Pada Gambar bagian (b), terlihat adanya *excess supply of labour*. Pada upah W_1 penawaran tenaga kerja (SL) lebih besar dari pada permintaan tenaga kerja (DL). Jumlah tenaga kerja yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N_2 sedangkan yang diminta hanya sebesar N_1 , dengan demikian ada orang yang menganggur pada tingkat upah W_1 ini sebanyak N_1N_2 .

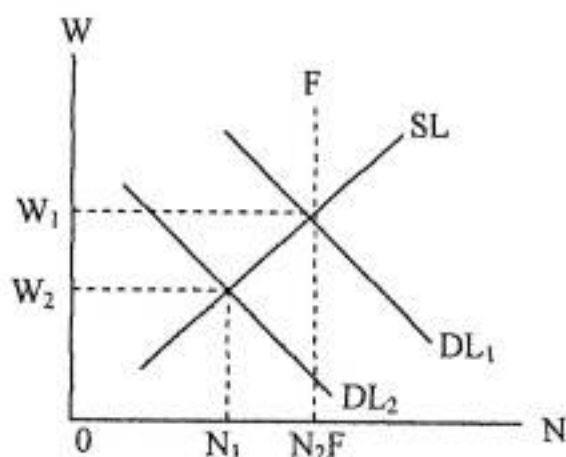
Pada Gambar bagian (c), terlihat adanya *excess demand of labour*. Pada tingkat upah W_2 permintaan akan tenaga kerja (DL) lebih besar dari pada penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja pada tingkat W_2 adalah sebanyak N_3 orang, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N_4 orang.

Adapun teori-teori tentang kesempatan kerja menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Menurut kaum Klasik, bila harga tenaga kerja yaitu upah fleksibel maka permintaan akan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Artinya tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Pada tingkat upah riil yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Mereka yang menganggur hanyalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi, mereka inilah pengangguran sukarela. Gambar berikut akan memperlihatkan proses tersebut:

Gambar 2.4
Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja
Menurut Teori Klasik



DL_1 dan DL_2 merupakan kurva permintaan akan tenaga kerja, SL adalah kurva penawaran tenaga kerja yang menunjukkan berapa orang yang bersedia bekerja pada berbagai tingkat upah riil. Kurva yang tegak F menunjukkan jumlah angkatan kerja yaitu semua orang yang mampu bersedia bekerja, pada posisi ini perekonomian berada pada posisi "full employment" yang berarti seluruh angkatan kerja yang bersedia bekerja dan dapat bekerja. Kalau pada suatu waktu produsen mengurangi produksinya misalnya karena barang-barang banyak yang belum laku, maka kurva permintaan akan tenaga kerja bergeser ke kiri dari DL_1 ke DL_2 dan tingkat upah yang berlaku akan turun dari W_1 ke W_2 serta jumlah orang yang bekerja turun dari N_2F ke N_1 . Sehingga dapat didefinisikan N_2F dikurangi N_1 adalah jumlah orang yang tidak bekerja. Tetapi orang yang tidak bekerja ini ($N_2F - N_1$) bukan pengangguran yang tidak sukarela, mereka

menganggur karena tidak mau bekerja pada tingkat upah yang baru yaitu W_2 , artinya menganggur secara sukarela.

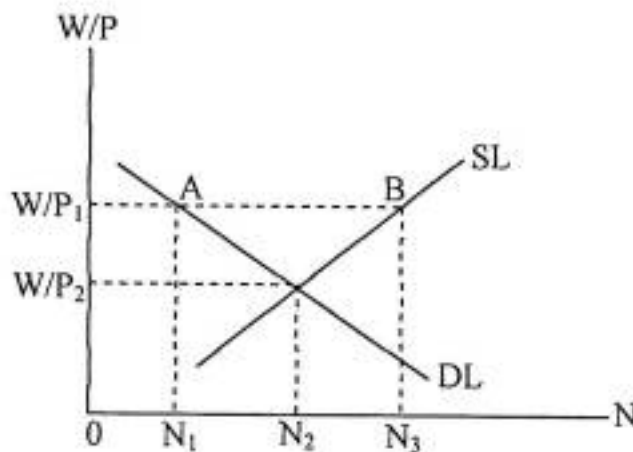
Tetapi pengangguran sukarela inipun tidak akan permanen melainkan hanyalah gejala atau fenomena yang bersifat sementara, di mana dalam jangka panjang akan hilang dengan sendirinya melalui bekerja secara bebas sesuai mekanisme pasar. Bila harga barang sudah saling menyesuaikan maka semua barang akan terjual dan tingkat produksi menjadi normal kembali. Sehingga kurva D_2 bergeser kembali menjadi D_1 akibatnya posisi *full employment* tercapai kembali.

2. Teori Keynes

Pasar tenaga kerja menurut Keynes hampir mirip dengan Klasik tetapi terdapat dua hal yang membedakannya yaitu pertama, upah nominal dapat naik tetapi tidak dapat turun, hal ini karena berlakunya ketentuan upah minimum. Misalnya sekarang upah riil W/P_1 dan terjadi kelebihan penawaran sebesar B ke A karena upah nominal tidak bisa turun (upah minimum) maka kelebihan penawaran tenaga kerja dapat dieliminasi dengan cara menaikkan tingkat harga menjadi P_1 sehingga keseimbangan W/P_2 tercapai. Kedua, upah nominal mungkin fleksibel tetapi tidak sefleksibel dalam model Klasik, jika upah nominal dapat turun sempurna maka akan diikuti dengan penurunan harga. Jika hal ini berlaku maka upah riil tidak akan turun (W/P_1 konstan).

Gambar 2.5

Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja Menurut Teori Keynes



3. Teori Lewis

Lewis mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja suatu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain.

Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Menurut Lewis, sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran. Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah dari pada sektor kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan.

Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran akan pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan atau ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.

Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaiknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi "terlalu banyak".

4. Teori Fei-Ranis

Fei-Ranis mengemukakan tentang ciri-ciri negara berkembang sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Fei-Ranis, ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, di mana para penganggur semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap di mana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. Ketiga, tahap ditandai dengan awal pertumbuhan

swasembada pada saat buruh pertanian yang menghasilkan output lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini kelebihan pekerja akan terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan penambahan output dan perluasan usahanya.

2.6 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Kesempatan Kerja

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi antara lain dalam hal peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan serta mewujudkan keseimbangan regional di dalam perekonomian. Nanga (2001) dalam makroekonomi mengatakan bahwa di dalam model Keynes sederhana tentang pasar barang dan jasa, keseimbangan pasar barang akan terjadi apabila penawaran agregat barang-barang dan jasa (Y) sama dengan permintaan akan barang dan jasa (AD), sebagaimana yang terlihat dalam persamaan berikut:

$$Y = C + I + G$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional/Produk domestik regional bruto(PDRB)

C = Konsumsi

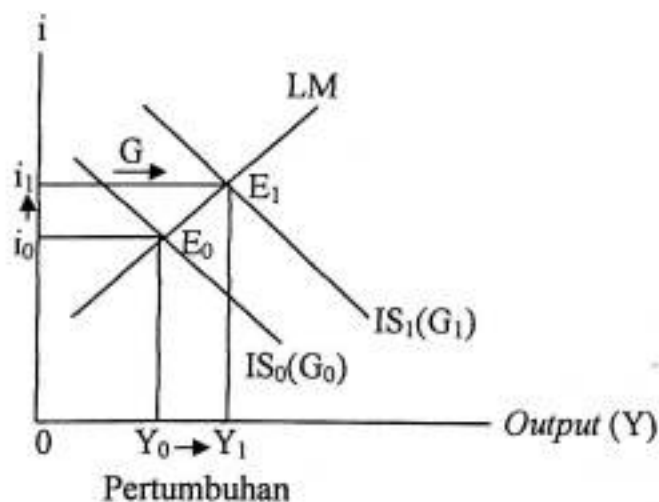
I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa secara teoritis pengeluaran pemerintah merupakan komponen dari pada *aggregate demand*. Peningkatan pada pengeluaran pemerintah berarti terjadi peningkatan pada permintaan agregat yang akan mendorong produksi domestik melalui mekanisme *multiplier effect* (angka pengganda) yaitu kenaikan produksi domestik atau pendapatan nasional sebagai akibat dari kenaikan pengeluaran pemerintah (dengan asumsi bahwa komponen-komponen permintaan agregat lainnya konstan). Hal ini sejalan dengan pernyataan Anwar dalam Laly (1991) bahwa pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran pemerintah tersebut dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik.

Dalam kerangka IS-LM dapat dilihat pada kurva berikut:

Gambar 2.6
Kebijakan Fiskal Ekspansif dalam Model IS-LM



Naiknya permintaan agregat (AD) yang disebabkan oleh kenaikan dalam pengeluaran pemerintah (G) akan mendorong kurva IS bergeser ke kanan dari $IS_0(G_0)$ ke $IS_1(G_1)$, yang menyebabkan tingkat bunga naik dari i_0 ke i_1 dan pendapatan atau *output* naik, sehingga terjadi pertumbuhan dari Y_0 ke Y_1 . Jadi dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang positif dengan PDRB.

Disisi lain, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam kaitannya dengan peningkatan PDRB suatu negara atau wilayah. Dalam hal ini peningkatan PDRB akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja, karena di satu sisi akan membutuhkan orang-orang yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana Suparmoko (1999) menjelaskan hubungan antara PDRB dan kesempatan kerja itu sebagai berikut: "PDRB itu sangat ditentukan oleh digunakannya faktor produksi tenaga kerja, kapital, sumber daya alam, tingkat teknologi dan kondisi sosial dalam negara yang bersangkutan. Pada umumnya terdapat hubungan yang positif antara jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi itu dengan PDRB. Jadi semakin banyak digunakan faktor produksi kapital, tenaga kerja, barang sumber daya alam dan tingkat teknologi yang lebih canggih serta keadaan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula tingkat PDRB suatu daerah.

Secara makro, hubungan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kesempatan kerja yang dapat diciptakan dalam setiap kenaikan produksi 1% atau

angka yang menunjukkan tingkat hubungan fungsional antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Jadi secara tehnik, elastisitas kesempatan kerja merupakan rasio antara laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi . Dengan kata lain, daya penyerapan tenaga kerja pada suatu sektor tergantung pada laju kenaikan produksi dan elastisitas kesempatan kerja sektor yang bersangkutan.

Ananta dan Tjiptoherijanto (1988) mengemukakan bahwa dalam angka elastisitas jumlah pekerja terhadap nilai tambah produk domestik bruto sebenarnya tersirat suatu asumsi bahwa pertumbuhan jumlah pekerja di suatu sektor adalah akibat dari pertumbuhan nilai produksi nyata di sektor tersebut. Demikian pula dengan Keynes yang mengatakan bahwa peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja yang berarti adanya perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian, angkatan kerja akan terserap oleh pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi menurun akan mengurangi daya serap angkatan kerja.

Elastisitas kesempatan kerja dirumuskan dengan:

$${}^nN = \frac{L^o}{Q^o}$$

Keterangan:

nN = Elastisitas kesempatan kerja

L^o = Laju pertumbuhan kesempatan kerja

Q^o = Laju pertumbuhan produksi

Analisis dengan menggunakan konsep elastisitas akan diperoleh hubungan-hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan kesempatan kerja dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Hubungan yang bersifat elastis; bila angka elastisitas >1

Angka elastisitas yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa setiap perubahan satu persen PDRB akan menyebabkan bertambahnya kesempatan kerja lebih dari satu persen.

- b) Hubungan yang bersifat unitary; bila angka elastisitas $=1$

Angka elastisitas yang sama dengan satu menunjukkan bahwa setiap perubahan satu persen PDRB akan menyebabkan perubahan proporsional pada kesempatan kerja sektoral.

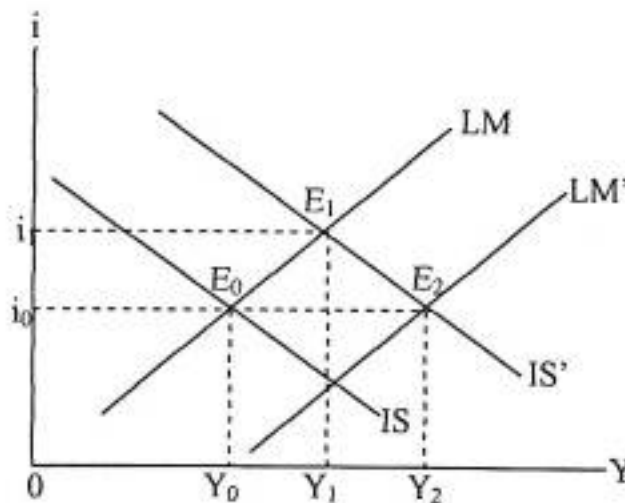
- c) Hubungan yang bersifat in elastis; bila angka elastisitas $0 < 1$

Angka elastisitas yang lebih kecil dari satu dan lebih besar dari nol menunjukkan bahwa perubahan satu persen pada PDRB akan menyebabkan perubahan kesempatan kerja sektoral di bawah satu persen.

Namun, pada umumnya elastisitas kesempatan kerja tersebut lebih kecil dari satu karena hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai tambah *bruto* lebih cepat daripada kesempatan kerja yang diciptakannya. Dalam hal ini memberikan indikasi bahwa perluasan usaha lebih mengarah pada usaha yang bersifat padat modal, di mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh teknologi yang tinggi dan kurang bisa menyerap tenaga kerja yang ada karena faktor pendidikan dan keterampilan yang tidak mendukung.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan kesempatan kerja penuh serta terciptanya kestabilan harga, kebijakan fiskal yang salah satu indikatornya adalah pengeluaran pemerintah harus berjalan seiring atau dikombinasikan dengan kebijakan-kebijakan lain, misalnya dengan kebijakan moneter. Dan untuk melihat bagaimana pengeluaran pemerintah mempengaruhi PDRB dalam menciptakan kesempatan kerja, dapat dilihat pada Gambar 2.7 yang menggambarkan kombinasi dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pemerintah dalam merangsang perekonomian.

Gambar 2.7
Perluasan Kebijakan Fiskal dan Penyesuaian Moneter



Pada Gambar tersebut dijelaskan bahwa keseimbangan awal terjadi pada E₀ pada tingkat suku bunga i_0 dan tingkat pendapatan nasional Y_0 . Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS dari IS ke IS' dan menaikkan pendapatan nasional dari Y_0 ke Y_1 dan terjadi keseimbangan baru yaitu E₁, akan tetapi pada keseimbangan tersebut (E₁) akan menaikkan tingkat suku bunga

dari i_0 ke i_1 . Untuk mencegah hal tersebut, maka bank sentral akan menaikkan penawaran uang sehingga kurva LM bergeser dari LM ke LM' dan memotong kurva IS' pada tingkat suku bunga i_0 dan titik keseimbangan baru berada pada E_2 . Dengan demikian, pengeluaran pemerintah telah meningkatkan pendapatan nasional/PDRB tanpa menaikkan tingkat suku bunga. Jadi investasi (investasi pemerintah) bisa berlanjut terus terutama untuk pembangunan proyek-proyek yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih layak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang merupakan komponen dari kebijakan fiskal sebagai bagian dari permintaan agregat mempunyai pengaruh yang positif terhadap PDRB, di mana pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor ekonomi akan mendorong terciptanya peningkatan PDRB (pertumbuhan ekonomi) pada sektor-sektor ekonomi tersebut melalui mekanisme *multiplier effect*. Sedangkan PDRB mempunyai hubungan dengan kesempatan kerja yang dapat diketahui melalui elastisitas kesempatan kerja, di mana perubahan pada PDRB akan menyebabkan perubahan pada kesempatan kerja yang tercipta yang ditentukan oleh angka elastisitas kesempatan kerja. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan kesempatan kerja yaitu melalui PDRB yang ditentukan oleh mekanisme *multiplier effect*.

2.7 Hipotesis

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, diduga bahwa:

1. Pengeluaran pembangunan pemerintah mempunyai hubungan yang positif dengan PDRB di Kabupaten Barru tahun 1993/1994-2003.
2. Pengeluaran pembangunan pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dalam menciptakan kesempatan kerja melalui peningkatan PDRB di Kabupaten Barru tahun 1993/1994-2003.

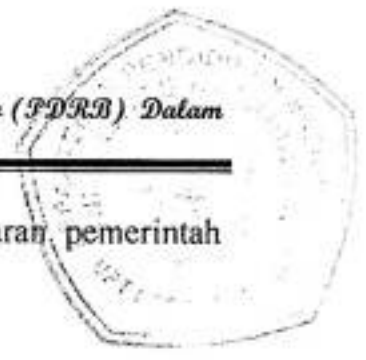
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, diantaranya dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan kondisi *full employment*.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu indikator dari kebijakan fiskal pemerintah, sebagaimana teori yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif terhadap PDRB. Dengan kata lain, perubahan peningkatan pengeluaran pembangunan akan meningkatkan PDRB melalui mekanisme *multiplier effect* dengan asumsi *ceteris varibus* (variabel lain tetap). Sedangkan peningkatan laju PDRB tersebut diasumsikan memiliki hubungan yang positif terhadap perluasan kesempatan kerja sehingga memberi peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam kaitannya dengan peningkatan PDRB suatu daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Keynes yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja yang berarti adanya perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja akan



terserap oleh pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pengeluaran pemerintah PDRB dan kesempatan kerja dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 3.1
Skema Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Kesempatan Kerja



3.2 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa data sekunder yang terdiri atas:

- a. Tingkat pengeluaran pemerintah yang ada di dalam APBD Kabupaten Barru tahun 1992/1993-2002
- b. Nilai PDRB Kabupaten Barru tahun 1993-2003

- c. Kesempatan kerja yang dihitung berdasarkan jumlah orang bekerja di Kabupaten Barru tahun 1993-2003

Data ini bersumber dari BPS, departemen tenaga kerja dan instansi-instansi terkait lainnya yang dapat mendukung kelengkapan data yang penulis butuhkan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan referensi atau bahan bacaan yang ada kaitannya dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- b. Penelitian lapangan (*Yield research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada instansi-instansi terkait yang menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3.4 Model Analisis

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya dilakukan olah data dengan menggunakan program *Eviews ver 3.1*.

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan pemerintah terhadap PDRB digunakan model analisis regresi sederhana. Pengeluaran pemerintah dan PDRB merupakan definisi sehingga tidak dapat diregres. Oleh karena itu, data pengeluaran pemerintah dalam regresi ini menggunakan data time lag

(-1) di mana pengaruhnya kelihatan setelah berjalan satu tahun. Jadi pengeluaran pemerintah pada tahun sebelumnya diregres dengan peningkatan nilai PDRB tahun sekarang yang merupakan dampak dari pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis *Curve Expert* yang telah dilakukan sebelumnya sesuai dengan data yang ada, maka model fungsi yang diperoleh antara lain:

$$Y = f(G_{-1})$$
$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln G_{-1} + \varepsilon_1$$

Di mana:

- Y = Nilai PDRB estimasi berdasarkan nilai pengeluaran pemerintah tahun lalu
- G_{-1} = Pengeluaran pemerintah secara *time lag*
- α_0 = Koefisien *intercep*
- α_1 = Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB
- ε = *Error term*

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja melalui peningkatan PDRB digunakan model analisis regresi 2 SLS (*Two Stage Stage Least Square*) atau metode dua tahap. Model analisis ini digunakan karena pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh langsung dalam menciptakan kesempatan kerja, akan tetapi pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap proses pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan melalui peningkatan PDRB

sebagai realisasi dari pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja.

$$L = f(Y)$$
$$Y = f(G_{-1})$$

Setelah data yang ada dianalisis dengan menggunakan *Curve Expert* untuk mendapatkan model yang tepat, maka model fungsi yang diperoleh sebagai berikut:

$$L = \beta_0 + \beta_1 \ln Y + \varepsilon_2$$

Di mana:

- L = Kesempatan kerja, diukur berdasarkan jumlah orang yang bekerja
- β_0 = Koefisien *intecep*
- β_1 = Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh PDRB terhadap kesempatan kerja

Sehingga untuk melihat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penciptaan kesempatan kerja melalui PDRB adalah dengan persamaan berikut:

$$L = \beta_0 + \beta_1 \ln Y + \varepsilon_2, \text{ di mana } Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln G_{-1} + \varepsilon_1$$

Sehingga,

$$L = \beta_0 + \beta_1 \ln(\alpha_0 + \alpha_1 \ln G_{-1} + \varepsilon_1) + \varepsilon_2$$

$$L = \beta_0 + \beta_1 \ln \alpha_0 + \beta_1 \ln \alpha_1 \ln G_{-1} + \beta_1 \ln \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

Jika saja:

$$\beta_0 + \beta_1 \ln \alpha_0 = \lambda_0$$

$$\beta_1 \ln \alpha_1 = \lambda_1$$

$$\beta_1 \ln \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \varepsilon^*$$

Maka persamaan akhirnya akan menjadi :

$$L = \lambda_0 + \lambda_1 \ln G_1 + \varepsilon^*$$

Di mana:

λ_0 = Koefisien *intercept*

λ_1 = Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja melalui PDRB

Berdasarkan model di atas maka untuk menguji tingkat signifikansinya dilakukan pengujian nilai statistik sebagai berikut:

- Uji statistik 'T' adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial pada tingkat signifikansi tertentu.
- Uji statistik 'F' adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan pada tingkat signifikansi tertentu.

3.5 Batasan Variabel

Untuk memudahkan penulis dalam mencari data dan menentukan variabel penelitian sekaligus untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka batasan variabelnya yaitu:

a. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan indikator dari kebijakan fiskal yang menunjukkan besarnya biaya yang harus digunakan pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatannya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada umumnya tercantum dalam APBD.

b. PDRB

PDRB adalah indikator dari pembangunan ekonomi daerah yang diartikan sebagai hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah/regional selama kurun waktu tertentu yang diukur dalam jutaan rupiah. Dan terbagi dalam 9 sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, air & gas, sektor bangunan, sektor perdagangan hotel & restoran, sektor angkutan & komunikasi, sektor keuangan & persewaan & jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa, dimana datanya dapat diperoleh dari BPS.

c. Kesempatan kerja merupakan lapangan kerja yang tersedia dalam masyarakat dan sudah diduduki (penggunaan tenaga kerja) atau banyaknya orang yang bekerja pada suatu lapangan kerja. Dengan kata lain, jumlah tenaga kerja yang terserap pada berbagai sektor ekonomi yang dicerminkan oleh jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis

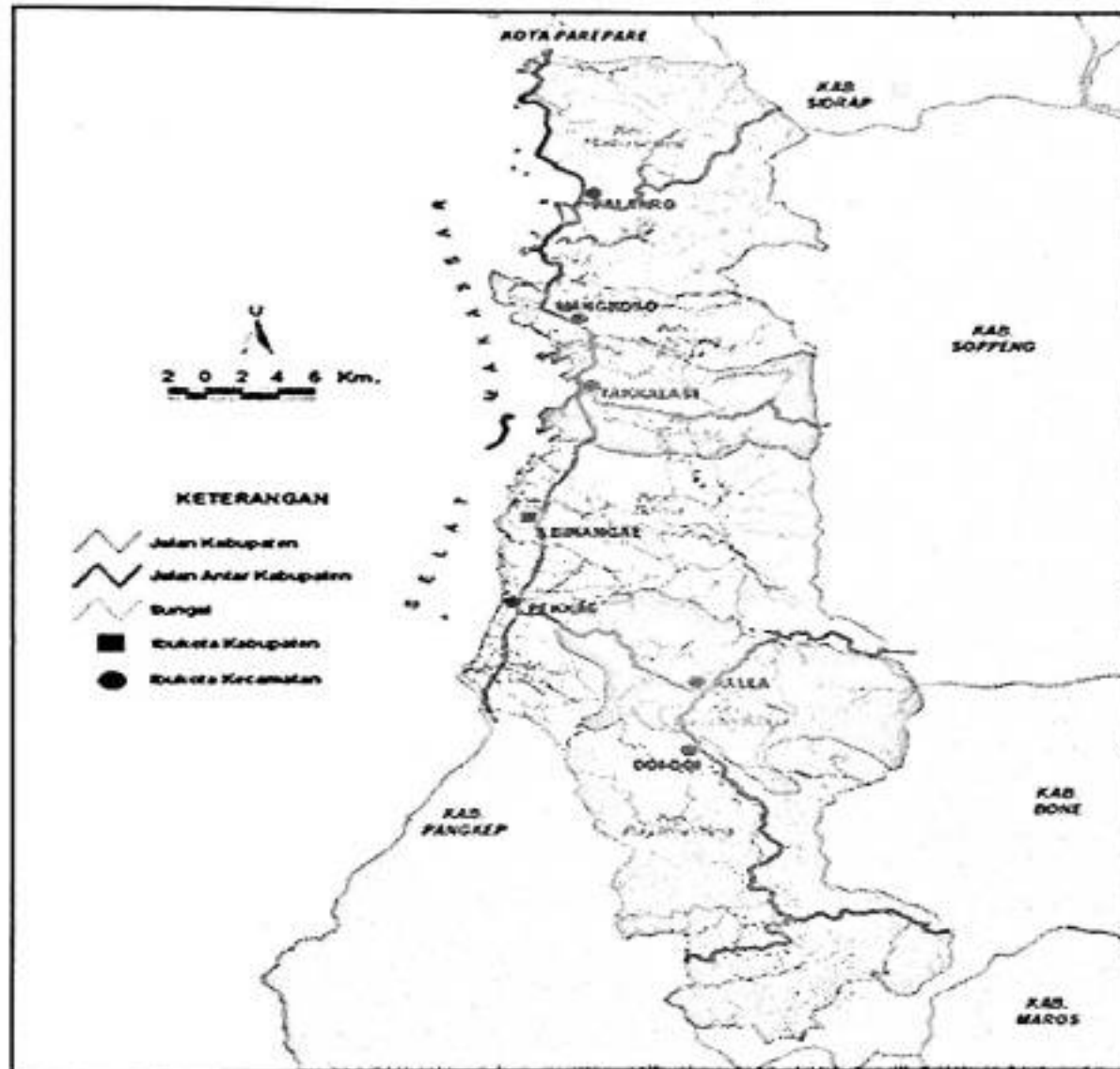
Kabupaten Barru merupakan salah satu wilayah yang mempunyai peranan cukup penting dalam pengembangan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan. Kondisi alam yang potensial terutama untuk lahan pertanian serta letak geografis yang sangat strategis menjadi pendukung utama dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Barru.

Secara geografis Kabupaten Barru terletak diantara koordinat $4^{\circ}05'49''$ – $4^{\circ}47'35''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}35'00''$ – $119^{\circ}49'16''$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ◆ Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pare-pare
- ◆ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- ◆ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- ◆ Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar peta Kabupaten Barru yang dilengkapi dengan nama-nama Ibukota Kecamatan.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Barru



Menurut data dari Biro Pusat Statistik daerah tingkat II Kabupaten Barru tahun 2003, luas wilayah Kabupaten Barru sekitar 1174.72 KM² secara administratif wilayah pemerintahan terbagi menjadi 7 kecamatan yang terdiri dari 54 desa/kelurahan. Perincian luas wilayah setiap kecamatan dan presentase serta jumlah kelurahan atau desa setiap kecamatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Dan Jumlah Kelurahan Atau Desa Setiap Kecamatan
Di Kabupaten Barru Tahun 2003

No	Kecamatan	Luas wilayah km ²	Presentase %	Jumlah kelurahan / desa
1	Barru	199,32	16,97	10
2	Soppeng Riaja	78,90	6,72	7
3	Tanete Rilau	79,17	6,74	10
4	Tanete Riaja	174,29	14,84	7
5	Mallusetasi	216,58	18,44	8
6	Pujananting	314,26	26,75	6
7	Balusu	112,20	9,55	6
Kabupaten Barru		1174,72	100,00	54

Sumber : BPS, Kabupaten Barru dalam Angka

4.2 Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Barru terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan survei sosial dan ekonomi nasional (susenas) tahun 2003, penduduk Kabupaten Barru berjumlah 159316 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yakni 35043 jiwa mendiami Kecamatan Barru.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Perincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin
Di Kabupaten Barru Tahun 2003

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis kelamin
1	Barru	16930	18113	35043	92
2	Soppeng Riaja	8555	8955	17510	94
3	Tanete Rilau	15494	16949	32443	91
4	Tanete Riaja	10169	11028	21197	93
5	Mallusetasi	11278	12255	23533	96
6	Pujananting	5684	6041	11725	91
7	Balusu	8502	9363	175865	92
Jumlah		76612	82704	159316	93

Sumber: BPS, Kabupaten Barru dalam Angka

Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Di dalam wilayah Kabupaten Barru penduduk usia kerja pada tahun 2003 diperkirakan sebanyak 126.632 jiwa atau 79,48 % dari total penduduk. Jumlah usia kerja tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan, akan tetapi melakukan kegiatan seperti sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya.

Di Kabupaten Barru pada tahun 2003 penduduk usia kerja sekitar 79,48 % dari total penduduk, terdiri dari :



a. Bukan Angkatan Kerja	: 53,08%
b. Angkatan Kerja	: 46,92%
♦ Bekerja	: 93,57%
♦ Mencari pekerjaan	: 6,43%

Sedangkan angkatan kerja yang bekerja di sektor-sektor ekonomi, terdiri dari tenaga kerja pada sektor :

1. Pertanian	: 58.96%
2. Pertambangan dan galian	: 0.92%
3. Industri	: 3.78%
4. Listrik dan gas	: 0.12%
5. Konstruksi	: 1.60%
6. Perdagangan	: 15.88%
7. Komunikasi	: 6.86%
8. Keuangan	: 0.11%
9. Jasa	: 11.78%

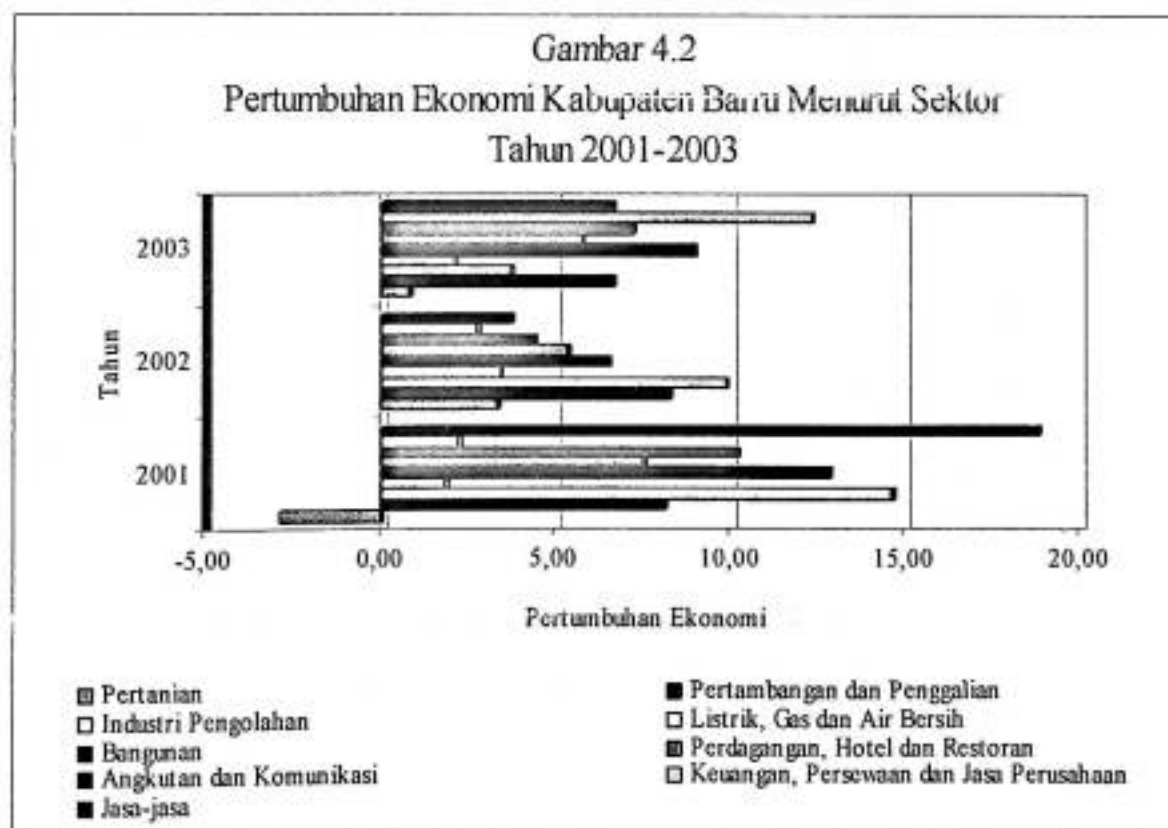
4.3 Perekonomian Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi

Upaya pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang amat luas cakupannya karena pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki

keterkaitan tidak saja dengan aspek-aspek ekonomi, melainkan juga dengan aspek sosial budaya, kemasyarakatan dan lainnya sebagainya. Peningkatan pendapatan suatu masyarakat dapat diukur melalui beberapa cara, salah satu diantaranya adalah dari hasil perhitungan pendapatan regional.

Perekonomian Kabupaten Barru pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 5,23 persen, angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2001, di mana pada tahun tersebut dicapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,58 persen. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan kontribusi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Barru 2003

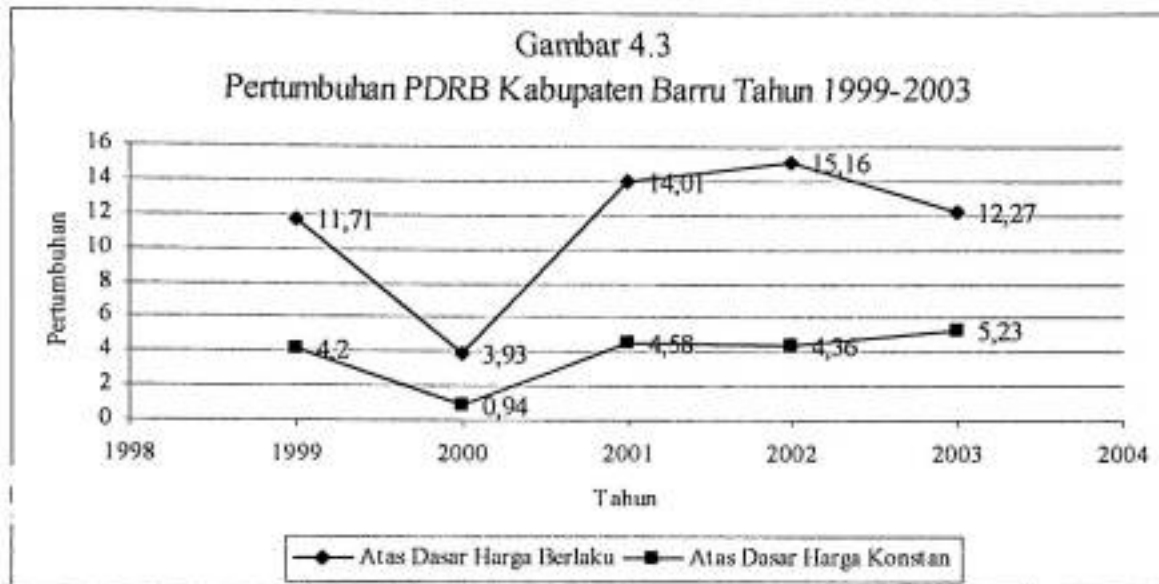
Meskipun sektor pertanian mempunyai pertumbuhan paling kecil diantara sektor-sektor lain pada tahun 2003, akan tetapi sektor pertanian tetap mempunyai kontribusi paling besar terhadap PDRB. Presentase kontribusi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Lampiran 8.

2. Pertumbuhan PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan yang berarti. Pada periode tahun 1999-2003 terjadi kenaikan dari Rp.355.672,49 pada tahun 1999 menjadi Rp. 558.048,45 pada tahun 2003 dan mengalami pertumbuhan sebesar 9,43 persen.

Sedangkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dihitung menurut harga konstan atau yang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah sebesar Rp.181.606,26 atau tumbuh sebesar 5,23 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 172.577,24 pada tahun 2002.

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Barru dari Tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 baik menurut harga konstan maupun harga berlaku dapat dilihat pada Gambar 4.3. Secara rata-rata, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru adalah sebesar 3,86 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan riil yang tidak lagi dipengaruhi oleh faktor inflasi. Nilai pertumbuhan PDRB secara rinci dapat dilihat pada lampiran 8.



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Barru Tahun 2003

Dibandingkan dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan yang merupakan hasil produksi barang dan jasa dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan, kontribusi PDRB Kabupaten Barru relatif masih sangat kecil.

Pada tahun 2002 kontribusi Kabupaten Barru terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan sebesar 1,36 persen. Kontribusi ini meningkat sebesar 0,03 persen pada tahun 2003 menjadi sebesar 1,39 persen dari total PDRB Sulawesi Selatan. Secara rata-rata, kontribusi PDRB Kabupaten Barru terhadap PDRB Sulawesi Selatan selama periode tahun 1999-2003 adalah sebesar 1,39 persen.

Tabel 4.3

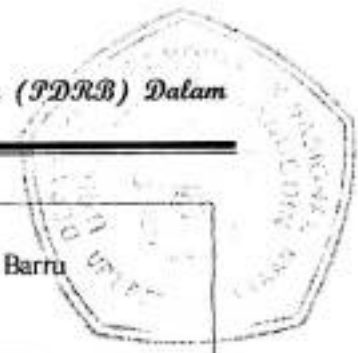
Perkembangan PDRB Sulawesi Selatan Dan PDRB Kabupaten Barru
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1999-2002

Tahun	PDRB (juta rupiah)		PDRB Kabupaten Barru Terhadap PDRB Prop. Sulsel
	Prop. Sul sel	Kabupaten Barru	
1999	24.064,89	335,67	1,48
2000	27.772,14	378,64	1,36
2001	32.087,08	440,06	1,37
2002	36.550,29	497,07	1,36
2003	40.094,87	558,05	1,39
Rata-Rata			1,39

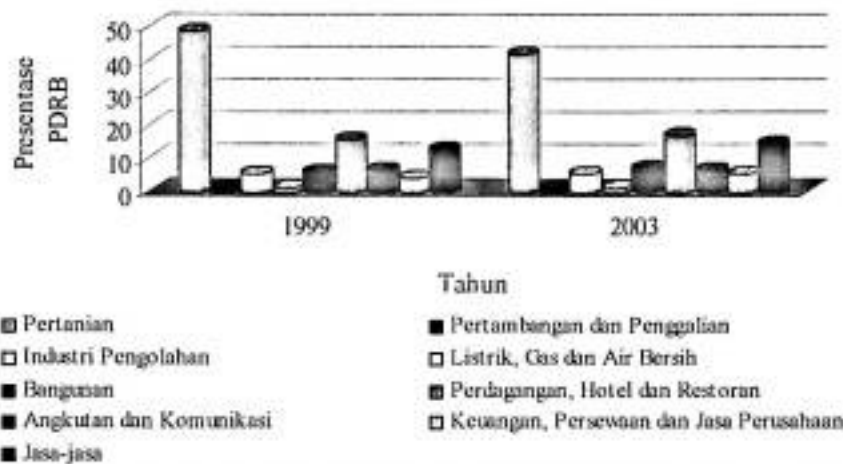
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Barru Tahun 2003

3. Struktur Perekonomian Kabupaten Barru

Selain laju pertumbuhan ekonomi, hal lain yang dapat diperoleh dari hasil perhitungan PDRB adalah struktur perekonomian berdasarkan komposisi PDRB-nya. Pada komposisi tersebut dapat dilihat peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB yang juga merupakan gambaran pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian daerah. Distribusi presentase PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 4.4
Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Barru
Tahun 1999-2003, Atas Dasar Harga Konstan 1993 (%)



Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Barru Tahun 2003

Selama beberapa tahun terakhir tidak terlihat adanya perubahan yang berarti pada struktur perekonomian Kabupaten Barru yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa peranan sektor pertanian memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Jika pada tahun 1999, *share*-nya sebesar 48,28 persen, dan pada tahun 2003 turun menjadi 41,78 persen. Dengan peranan yang demikian besar, diperlukan perhatian khusus oleh pemerintah daerah terhadap sektor ini. Peningkatan produksi pangan terutama padi dan palawija harus terus diupayakan, minimal produksi yang telah dicapai terus dipertahankan, karena penurunan produksi pertanian akan sangat mempengaruhi PDRB Kabupaten Barru secara keseluruhan.

Sektor lainnya yang juga memegang peranan yang cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan peranan sebesar 17,10 persen pada tahun

2003. Demikian juga dengan sektor jasa-jasa, pada tahun 2003 memberikan kontribusi sekitar 14,43 persen terhadap total PDRB Kabupaten Barru. Untuk mengetahui peranan masing-masing sektor terhadap PDRB atau distribusi presentase PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Barru lebih rinci, dapat dilihat pada Lampiran 9.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 1992/1993-2002

Pengeluaran pembangunan pada intinya dikaitkan dengan kegiatan yang terus menerus dan ada akhirnya seperti adanya peningkatan, pengembangan dan sebagainya. Pengeluaran pembangunan pada dasarnya merupakan investasi dari pemerintah untuk ikut serta dalam menggerakkan roda pembangunan yang diklasifikasikan berdasarkan sektor persektor yang mencerminkan kegiatan masyarakat yang ada di daerah dalam lingkup sosial, budaya, politik, agama pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam hal ini berarti pengeluaran pemerintah ikut mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB dalam perekonomian daerah.

Alokasi pengeluaran pembangunan oleh pemerintah dilakukan sebagai upaya memenuhi tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang dilakukan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah ada serta pembangunan sarana dan prasarana yang baru. Alokasi pengeluaran pembangunan dalam APBD bersumber dari daerah itu sendiri maupun yang berasal dari pusat. Pengalokasiannya terbagi ke dalam 20 sektor pembangunan, antara lain:

- 1) Sektor Industri
- 2) Sektor Pertanian dan Kehutanan
- 3) Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi

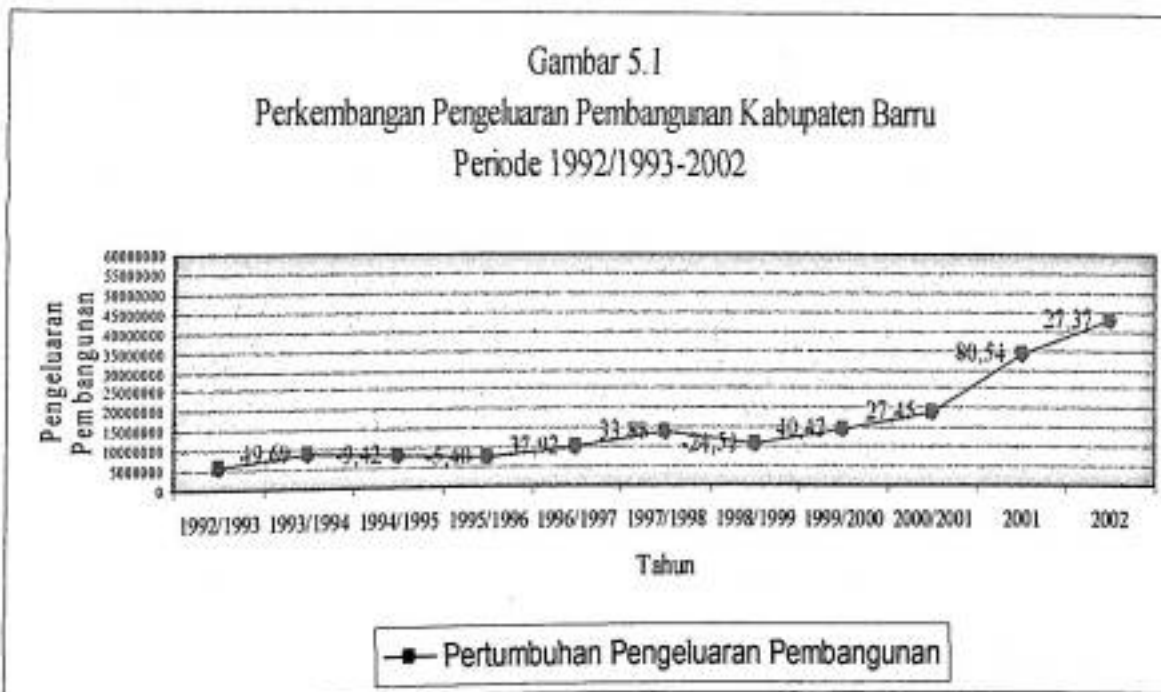
- 4) Sektor Tenaga Kerja
- 5) Sektor Perdagangan, Pengelolaan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi
- 6) Sektor Transportasi, Metereologi dan Geofisika
- 7) Sektor Pertambangan dan Energi
- 8) Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
- 9) Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi
- 10) Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
- 11) Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga
- 12) Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
- 13) Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita
- 14) Sektor Perumahan dan Pemukiman
- 15) Sektor Agama
- 16) Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 17) Sektor Hukum
- 18) Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan
- 19) Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
- 20) Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum

Dari segi alokasi dana, pengeluaran pembangunan daerah belum dilandasi oleh ukuran-ukuran kinerja yang baik sehingga jumlah dana untuk pengeluaran pembangunan yang tertera dalam anggaran daerah adalah jumlah dana yang

maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos pengeluaran pembangunan sehingga pemerintah daerah cenderung untuk menghabiskan dana yang tersedia.

Kegiatan pembangunan pemerintah dalam suatu perekonomian pada dasarnya selalu meningkat seiring dengan perkembangan zaman serta penambahan jumlah penduduk yang semakin membutuhkan sumber-sumber produktif baru. Demikian pula halnya kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Barru yang mengalami peningkatan secara gradual.

Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun dan peningkatan itu terjadi hampir di setiap sektor. Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran pembangunan pemerintah dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber : BPS, Kabupaten Barru Dalam Angka Berbagai Edisi

Dari Gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran pembangunan pemerintah dari tahun 1992/1993-1998/1999 berfluktuasi, namun 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 1999/2000-2002 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu secara rata-rata sebesar 43,95%. Penurunan pengeluaran pemerintah yang terbesar terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 25,51% dari Rp 13.878.760 ribu pada tahun 1997/1998 menjadi Rp 10.476.845 ribu pada tahun 1998/1999. Penurunan pengeluaran pembangunan pemerintah ini terjadi sebagai dampak dari krisis ekonomi di Indonesia yang juga mempengaruhi pengeluaran pemerintah Kabupaten Barru.

Dari sekian sektor yang ada pada struktur pengeluaran pembangunan pemerintah dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi yang cukup beragam, fluktuasi yang terjadi pada sektor-sektor pengeluaran pembangunan ini menggambarkan bahwa dalam penyusunan anggaran pengeluaran pembangunan pemerintah terdapat skala prioritas yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pariwisata dan telekomunikasi daerah merupakan alokasi pengeluaran pembangunan yang terbesar dari tahun 1992/1993-1996/1997, akan tetapi pada tahun 1997/1998-2002 alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah pada sektor pariwisata menurun drastis dan alokasi pengeluaran pembangunan terbesar dialihkan ke sektor transportasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perhatian pemerintah yang cukup besar pada sektor transportasi dilakukan pemerintah dalam upaya memudahkan dan melancarkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatan

perkapita masyarakat meningkat yang akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kabupaten Barru dikenal sebagai daerah agraris, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi dan mempunyai mata pencaharian sebagai petani ternyata kurang mendapat perhatian yang berarti dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kontribusi alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah pada sektor pertanian dan kehutanan terhadap total pengeluaran pembangunan yang semakin menurun dari tahun ke tahun, di mana alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah pada sektor tersebut dari tahun 2002 rata-rata hanya sebesar 3,68% dari total pengeluaran pembangunannya.

Sedangkan pengeluaran pembangunan sektor industri masih berfluktuasi setiap tahunnya. Akan tetapi secara riil kontribusi pengeluaran pembangunan sektor industri terhadap total pengeluaran pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 1992/1993 hanya sebesar 0,04% dan pada tahun 2002 sebesar 0,42%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah cukup memperhatikan sektor ini karena dianggap cukup potensial dalam memberikan sumbangan terhadap peningkatan PDRB dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Sektor lain yang mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah adalah sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia secara utuh karena sumber daya manusia merupakan pelaksana dan

penggerak dalam pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan dasar yang utama untuk meningkatkan sektor lain atau mendidik manusia-manusia yang akan menjalankan sektor-sektor lainnya. Artinya, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya sektor aparatur pemerintah dan pengawasan mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun ke tahun, di mana kontribusinya terhadap total pengeluaran pembangunan pada tahun 1992/1993 hanya sebesar 1,8% meningkat menjadi 9,5% pada tahun 2002.

Demikian pula halnya dengan sektor-sektor lain seperti sektor perdagangan dan pengembangan usaha, sektor agama, sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita dan anak remaja, sektor perumahan dan pemukiman, dan sektor-sektor lainnya secara nominal mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah dari tahun ke tahun.

Secara umum, pengeluaran pembangunan pemerintah Kabupaten Barru periode 1992/1993-2002 mengalami perkembangan. Pengalokasian pengeluaran pembangunan pemerintah tersebut diharapkan agar betul-betul diarahkan ke sektor-sektor yang nantinya dapat menghasilkan output yang lebih besar untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan serta berdampak pada penciptaan kesempatan kerja.

Alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah Kabupaten Barru tiap-tiap sektor secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.

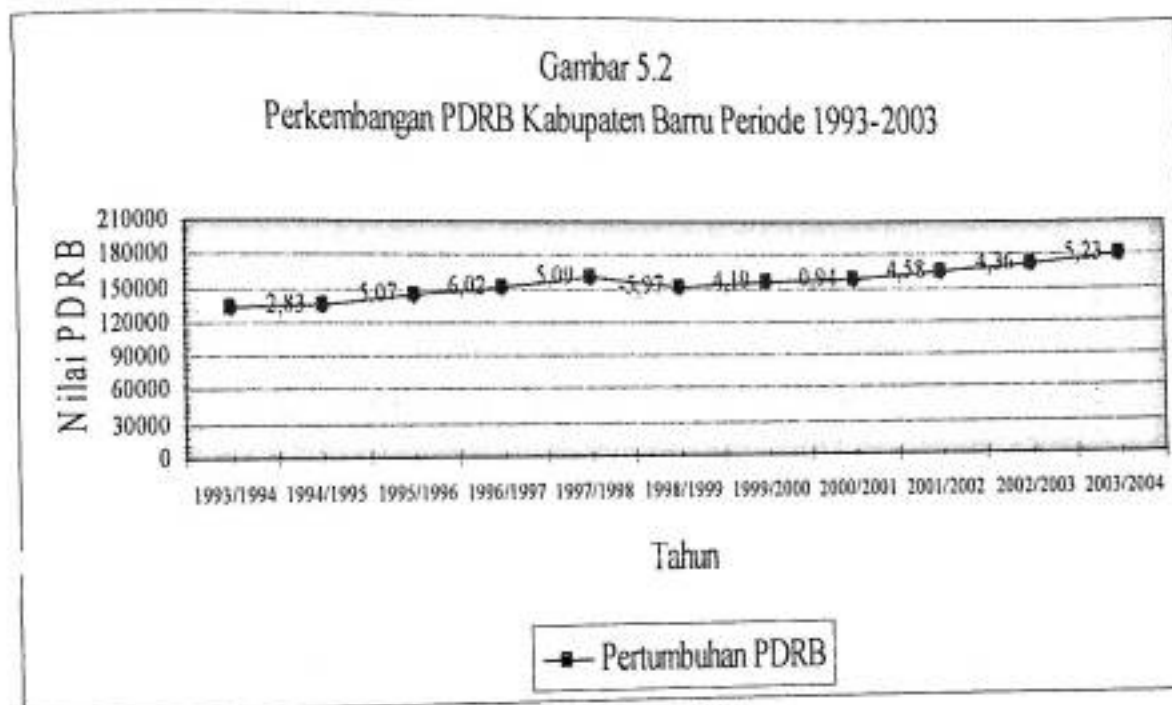
5.2. PDRB Kabupaten Barru Tahun 1993-2003

PDRB merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk mengamati hasil pembangunan terutama pembangunan ekonomi di suatu wilayah, selain itu juga digunakan untuk menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Keadaan ekonomi (dalam hal ini diwakili dengan PDRB) suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. PDRB berdasarkan harga konstan terbagi dalam 9 sektor antara lain:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan galian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan, restoran dan hotel
7. Angkutan dan komunikasi
8. Bank dan lembaga keuangan lain
9. Jasa-jasa

Keadaan perekonomian Kabupaten Barru periode 1993-2003 yang dilihat dari nilai PDRB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 1998 mengalami penurunan yang cukup berarti. Nilai PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 1997 sebesar 159882,6 menjadi 150332,9 pada tahun 1998 sehingga pertumbuhan ekonomi kabupaten Barru menjadi -5,97%. Hal ini merupakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia juga mempengaruhi kegiatan

ekonomi Kabupaten Barru. Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB Kabupaten Barru berdasarkan harga konstan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber : BPS, Kabupaten Barru Dalam Angka Berbagai Edisi

Dari Gambar tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun berfluktuasi. Meskipun demikian, nilai PDRB berdasarkan harga konstan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan kecuali tahun 1998. Secara rinci nilai PDRB dapat dilihat pada Lampiran 4. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada periode 1993-2003 terjadi pada tahun 1996 yaitu sebesar 6,02%. Sedangkan pada tahun 2000, meskipun pertumbuhan yang terjadi menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 0,94% akan tetapi nilai PDRB pada tahun tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai PDRB yang terjadi didukung oleh peningkatan tiap-tiap sektor ekonomi yang mendukung PDRB.

Ditinjau dari komposisi PDRB kabupaten Barru periode tahun 1993-2003, dari 9 sektor yang mendukung PDRB ada tiga sektor yang peranannya paling menonjol yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Ketiga sektor andalan ini, tiap tahunnya memberikan kontribusi lebih dari 75% terhadap PDRB dan kurang lebih 25% dari total PDRB tersebut terbagi dalam 6 sektor lainnya, di mana sektor yang paling sedikit kontribusinya terhadap PDRB yaitu sektor listrik, gas dan air.

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap nilai PDRB, meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 1993 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 51,61% dan pada tahun 2003 hanya sebesar 43,51%. Peranan sektor pertanian yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan daerah Kabupaten Barru merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya berprofesi dan mempunyai mata pencaharian sebagai petani, sedangkan penurunan kontribusi sektor pertanian ini tiap tahunnya merupakan salah satu ciri terjadinya pergeseran struktur ekonomi.

Kontribusi Sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total nilai PDRB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 1993 hanya sebesar 13,51% dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 17,26%. Peningkatan sektor ini didukung oleh pengeluaran pemerintah yang cukup besar pada sektor transportasi yang berdampak pada kemudahan dan kelancaran bagi masyarakat

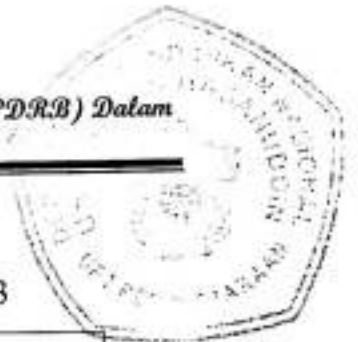
dalam melakukan aktivitas ekonomi terutama dalam hal pemasaran produksi pertanian dan lain sebagainya.

Kontribusi Sektor jasa-jasa periode 1993-2003 masih berfluktuasi, meskipun demikian sektor ini tetap mempunyai peranan yang cukup berarti terhadap peningkatan PDRB yaitu pada tahun 1993 kontribusinya sebesar 12.36% sedangkan pada tahun 2003 meningkat menjadi 14.27 %.

5.3. Kesempatan Kerja Kabupaten Barru Tahun 1993-2003

Ketidakseimbangan Pertumbuhan dan penambahan jumlah angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja merupakan masalah bagi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, di mana keadaan ini akan menimbulkan pengangguran baik secara terbuka maupun secara terselubung.

Tingkat pengangguran yang terjadi disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap semua angkatan kerja. Ketidakmampuan sektor industri menyerap tenaga kerja lebih banyak karena kecenderungan investasi di sektor industri lebih dominan dalam bentuk padat modal yang membutuhkan tenaga kerja profesional sehingga tenaga kerja yang tidak memiliki *skill* (keahlian) tidak bisa terserap dalam dunia kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa titik tolak dari adanya pengangguran tersebut adalah menyangkut aspek sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Tingkat pengangguran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 5.1

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Barru Tahun 1993-2003

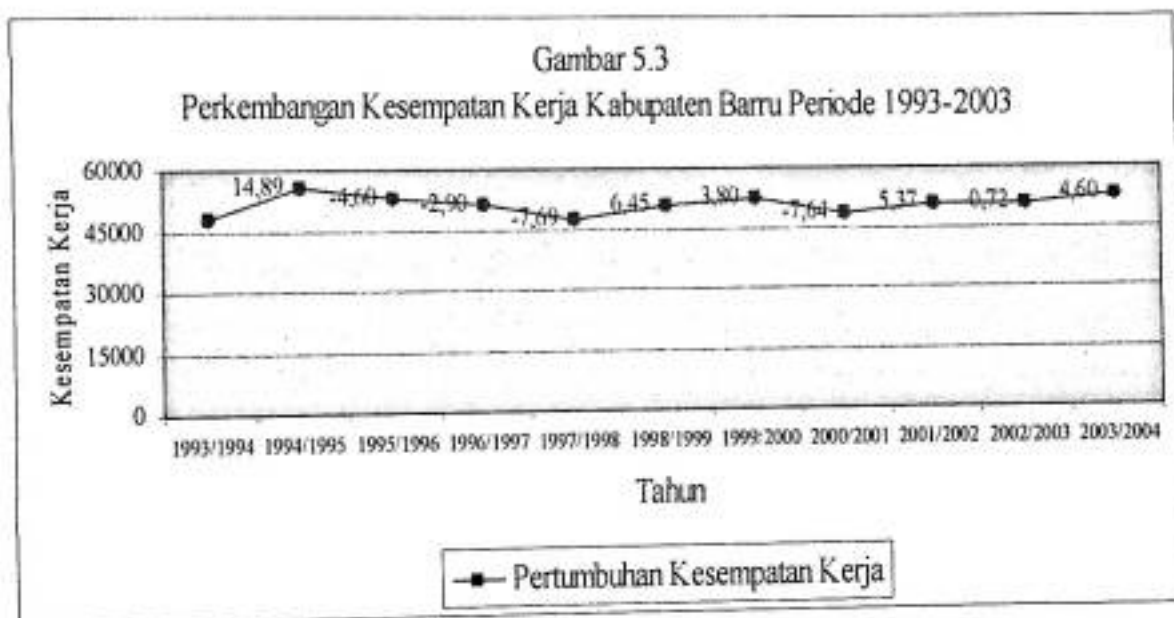
Tahun	Jumlah Pencari Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran (%)
1993	4974	53241	9,34
1994	5625	61078	9,21
1995	7642	60542	12,62
1996	2690	54054	4,97
1997	3597	51012	7,05
1998	5676	56149	10,11
1999	3610	56000	6,44
2000	1515	49900	3,04
2001	3740	54725	6,83
2002	4146	54762	7,57
2003	3818	59415	6,43
Rata-rata			7,60

Sumber :BPS, Susenas Berbagai Edisi

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Barru periode 1993-2003 dari tahun ke tahun masih berfluktuasi. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 1995 yaitu 12,62% bila dibandingkan dengan tahun 1994 hanya sebesar 9,21%, meskipun jumlah pencari kerja pada dasarnya menurun 536 jiwa yaitu 61078 jiwa pada tahun 1994 menjadi 60542 jiwa pada tahun 1995. Sedangkan tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 3,04% dengan jumlah pencari kerja hanya sebesar 1515 jiwa, namun pada tahun 2003

meningkat lagi menjadi 6,43% seiring dengan meningkatnya jumlah pencari kerja sebesar 3818 jiwa.

Demikian pula halnya dengan jumlah kesempatan kerja di Kabupaten Barru periode 1993-2003 juga berfluktuasi yang dapat dilihat pada Lampiran 6. Sedangkan perkembangan kesempatan kerja dapat dilihat pada Gambar berikut:

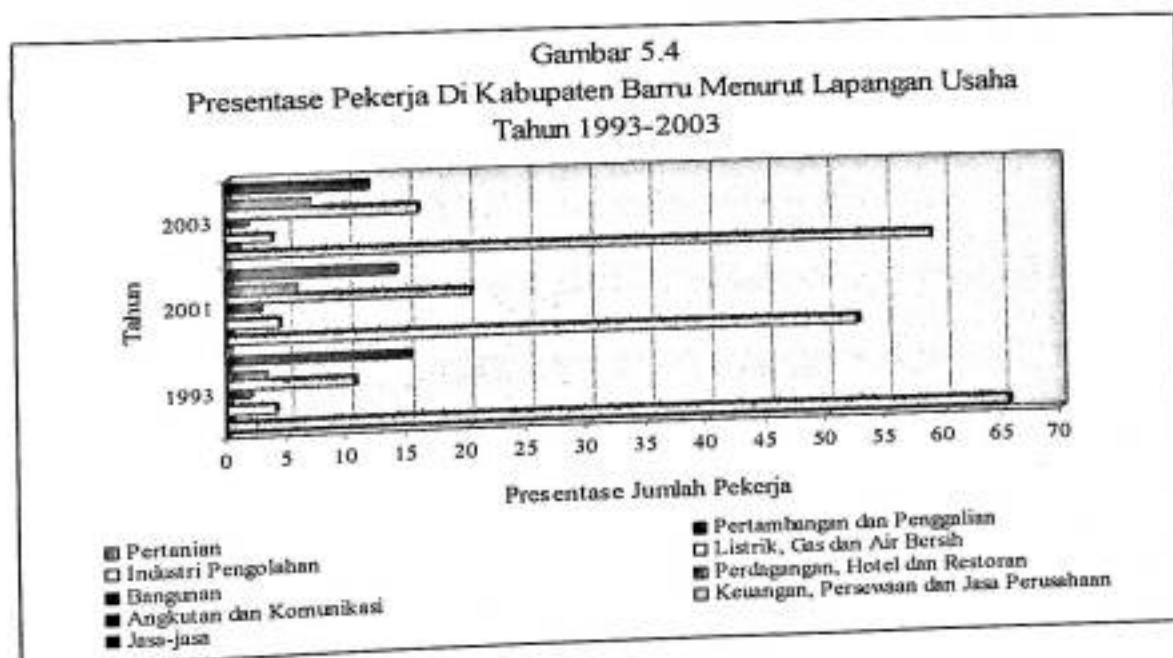


Sumber: BPS, *Susenas Berbagai Edisi*

Pada periode 1993-2003 pertumbuhan kesempatan kerja tertinggi di Kabupaten Barru terjadi pada tahun 1994 sebesar 14,89% dari 48267 jiwa pada tahun 1993 menjadi 55453 jiwa pada tahun 1994. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1997 sebesar -7,69% dari 51364 jiwa pada tahun 1996 menjadi 47415 jiwa pada tahun 1997. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 1997 banyak terjadi perampangan jumlah tenaga kerja sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK dan

juga banyak pengusaha terpaksa gulung tikar yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Ini merupakan dampak dari terjadinya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997. Namun pada tahun 2003 jumlah angkatan kerja yang terserap meningkat menjadi 52942 jiwa dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,60% dari tahun sebelumnya, di mana jumlah kesempatan kerja hanya sebesar 50616 jiwa pada tahun 2002.

Penyerapan kesempatan kerja tidak terlepas dari adanya pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor, oleh karena itu dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang cukup tinggi di masing-masing sektor ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Barru. Presentase kemampuan sektor-sektor ekonomi menyerap tenaga kerja dapat dilihat pada Gambar 5.4, namun secara rinci kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dapat dilihat pada Lampiran 6.



Sumber :BPS ,Susenas Berbagai Edisi

Dari Gambar 5.4 dapat diketahui bagaimana perkembangan kesempatan kerja di Kabupaten Barru selama periode tahun 1993-2003, sebagian besar penduduk di kabupaten barru memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melalui usaha pertanian, perdagangan, dan pelayanan jasa-jasa masyarakat. Pada tahun 1993 sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 65,39% dari jumlah total kesempatan kerja semua sektor ekonomi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 31560 jiwa. Namun pada tahun 2001 tenaga kerja yang mampu terserap pada sektor ini menurun hanya sebesar 52,65% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 26845 jiwa. Dan pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 58,96% seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mampu terserap pada sektor ini yaitu sebanyak 31213 jiwa.

Sektor yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan yaitu mampu menyerap tenaga kerja sebesar 10,45% dari total kesempatan kerja untuk semua sektor ekonomi atau sebanyak 5042 jiwa yang bekerja di sektor perdagangan. Kemudian pada tahun 2001, presentase kesempatan kerja pada sektor perdagangan meningkat menjadi 20,19% atau sebanyak 10295 jiwa. Pertumbuhan ini didorong oleh semakin berkembangnya subsektor perdagangan besar dan perdagangan eceran, dengan demikian sektor perdagangan akan membutuhkan tenaga-tenaga kerja baru. Namun pada tahun 2003 kemampuan sektor perdagangan ini menyerap tenaga kerja menurun menjadi 15,58% atau sebanyak 8405 jiwa tenaga kerja yang bekerja di sektor ini. Meskipun demikian sektor perdagangan pada tahun 2003 tetap menjadi sektor kedua yang mampu menyerap tenaga kerja tertinggi.

Sektor lain yang berperan menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi adalah sektor jasa, meskipun mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993 kemampuan sektor ini menyerap tenaga kerja sebesar 15,21% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 7340 dan pada tahun 2001 menurun menjadi 7120 atau sebesar 13,96% dari semua sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2003, sektor ini menurun lagi menjadi 6234 jiwa atau sekitar 11,78%.

Sedangkan sektor yang sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor listrik dan gas. Kemampuan sektor-sektor ini menyerap tenaga kerja dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai 0,50%, yaitu pada tahun 1993 belum ada tenaga kerja yang terserap pada sektor ini, namun pada tahun 2001 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menyerap tenaga kerja sebesar 0,22%. Akan tetapi pada tahun 2003 menurun lagi menjadi 0,11%. Sedangkan sektor listrik, gas dan air hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 0,11% pada tahun 2001 dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 0,12%.

Pada tahun 2003 kemampuan sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa menyerap tenaga kerja cukup tinggi yaitu sebesar 86,61% dan 13,39% sisanya tersebar dalam 6 sektor ekonomi yang lain yaitu sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

5.4. Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap PDRB di Kabupaten Barru Tahun 1993/1994-2003

Untuk membuktikan hipotesis sebelumnya yaitu bahwa variabel independen dalam hal ini pengeluaran pemerintah (pengeluaran pembangunan) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen (PDRB), maka dilakukan perhitungan dengan metode regresi sederhana dengan menggunakan program analisis Eviews ver 3.1.

Dari persamaan regresi sederhana ini dapat kita ketahui bagaimana pengaruh pengeluaran pembangunan pemerintah Kabupaten Barru terhadap PDRB. Dalam pengujian ini dipergunakan data time series tahun 1992/1993-2003 dengan variabel $Y = \text{PDRB}$, dan $G_{-1} = \text{pengeluaran pembangunan pemerintah tahun sebelumnya}$.

Hasil dari perhitungan regresi sederhana yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 dan diperoleh model regresi sebagai berikut :

$$Y = -1910699701 + 21147,80645 \ln G_{-1}$$

(6,369)

$$R^2 = 0,818$$

$$\text{Statistik uji } F = 40,562$$

Angka dalam kurung merupakan statistik uji T

Berdasarkan hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan pemerintah tahun sebelumnya (variabel independen) mempunyai hubungan yang positif dengan PDRB (variabel dependen) yang ditunjukkan oleh nilai koefisien dari pengeluaran pembangunan pemerintah (G_{-1}) yang bertanda positif yaitu

sebesar 21147,81 yang berarti bahwa setiap kenaikan jumlah pengeluaran pemerintah sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini diukur dengan PDRB akan meningkat sebesar Rp 21147,81 juta dengan asumsi *ceteris paribus* (variabel lainnya tetap). Nilai koefisien dari variabel independen tersebut juga menunjukkan elastisitas pengeluaran pembangunan terhadap PDRB.

Kelayakan model antara variabel independen dan variabel dependen dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi (R^2) yang ditemukan dalam model ini adalah 0,818, hal ini berarti bahwa variasi seluruh variabel independen (pengeluaran pembangunan) dapat menjelaskan variasi variabel dependen (PDRB) sebesar 81,8%. Dengan demikian variasi variabel lain yang menjelaskan variasi perubahan PDRB yang tidak diperhitungkan ke dalam model hanya sebesar 18,2% atau dengan kata lain 81,8% variasi naik/turunnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan, dan sisanya yaitu sebesar 18,2% dipengaruhi oleh faktor di luar model tersebut. Misalnya investasi swasta, konsumsi, ekspor, impor, dan lain-lain ($Y=C+I+G(X-M)$). Jadi dapat disimpulkan bahwa model ini cukup layak.

Untuk melihat tingkat signifikansi antara variabel independen dan variabel dependen secara simultan atau bersama-sama digunakan statistik uji F, sedangkan statistik uji T digunakan untuk melihat tingkat signifikansi model secara parsial (individual) atau menguji keberartian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Dari hasil perhitungan regresi ini diperoleh nilai F sebesar 40.562 yang signifikan pada level 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa variabel

independen (pengeluaran pembangunan) secara simultan berpengaruh nyata atau cukup berarti terhadap variabel dependen (PDRB). Dari hasil perhitungan regresi ini ditemukan bahwa variabel pengeluaran pembangunan daerah secara parsial berpengaruh nyata terhadap PDRB yang diketahui dari nilai T hitung yang lebih tinggi dari T tabel pada $\alpha = 0,05$ dengan nilai T hitung sebesar 6.369 yang signifikan pada level 100%.

Jadi, dari hasil regresi ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap PDRB (pertumbuhan ekonomi) dan sesuai dengan hipotesis serta teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian, jika alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah tersebut betul-betul diarahkan dan disalurkan sesuai pada tempatnya dan tidak ada penyalahgunaan maka peningkatan dalam pengeluaran pembangunan tersebut akan memicu terciptanya peningkatan dalam PDRB (pertumbuhan ekonomi) di Kabupaten Barru melalui mekanisme *multiplier effect*.

5.5. Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap PDRB Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja di Kabupaten Barru Tahun 1993/1994-2003

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengeluaran pemerintah (pengeluaran pembangunan) mempunyai korelasi yang positif yang tidak langsung terhadap kesempatan kerja akan tetapi melalui PDRB, hal ini disebabkan karena pengeluaran pembangunan pada sektor-sektor ekonomi merupakan investasi

pemerintah yang dapat memacu peningkatan PDRB pada sektor-sektor ekonomi tersebut dan akan membawa dampak terhadap penyerapan kesempatan kerja di sektor-sektor ekonomi yang ditentukan melalui mekanisme *multiplier effect*-nya. Karena dengan investasi yang besar baik itu dari pemerintah ataupun dari swasta, cenderung akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membutuhkan tenaga kerja atau dengan kata lain investasi yang besar akan membuka peluang-peluang kesempatan kerja yang baru.

Untuk melihat pengaruh pengeluaran pembangunan pemerintah terhadap penciptaan kesempatan kerja di Kabupaten Barru melalui pertumbuhan ekonomi (PDRB), diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut:

$$L = 81609,03 - 1871,55 \ln Y$$

(2,149)

$$R^2 = 0,345$$

$$\text{Statistik uji } F = 4,618$$

Angka dalam kurung merupakan statistik uji T

Dari hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB sebagai akibat dari adanya pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh yang nyata secara parsial terhadap penciptaan kesempatan kerja yang dapat dilihat pada tingkat signifikansi dari uji T hitung yaitu signifikan pada level 94 % pada $\alpha = 0,10$ dengan nilai T hitung sebesar 2,149. Demikian pula dengan tingkat signifikansi antara variabel dependen dan variabel independen secara simultan menunjukkan bahwa antara variabel dependen dan variabel independen mempunyai hubungan yang



signifikan atau pengaruh yang nyata secara simultan dapat dilihat dari hasil uji F yang signifikan pada level 94 % meskipun nilai F hitungnya kecil yaitu hanya sebesar 4,62.

Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh hanya sebesar 0,345 yang artinya hanya sekitar 34,5% variasi naik dan turunnya penciptaan kesempatan kerja ditentukan atau dipengaruhi oleh PDRB sebagai akibat dari adanya peningkatan pengeluaran pembangunan dan sekitar 65,5% ditentukan oleh faktor-faktor di luar model.

Dari model hasil analisis regresi tersebut juga menunjukkan bahwa PDRB sebagai akibat dari adanya pengeluaran pembangunan mempunyai hubungan yang negatif dalam menciptakan kesempatan kerja di Kabupaten Barru periode 1993-2003 yang dapat dilihat dari nilai koefisien regresi Y (PDRB) yang bertanda negatif yaitu sebesar (-1871,55) dan berarti bahwa setiap kenaikan dari 1% PDRB yang dipengaruhi pengeluaran pembangunan maka jumlah kesempatan kerja akan menurun sebesar 1871,55 orang. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, di mana pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi (pengeluaran pembangunan) mempunyai hubungan atau pengaruh positif dalam menciptakan kesempatan kerja melalui peningkatan PDRB (pertumbuhan ekonomi). Dengan kata lain, peningkatan dalam pengeluaran pembangunan akan memicu pertumbuhan ekonomi dan menurut Keynes angkatan kerja akan terserap oleh pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pembangunan pemerintah mempunyai hubungan atau pengaruh yang relatif kecil terhadap penciptaan kesempatan kerja melalui PDRB di Kabupaten Barru periode 1993-2003. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pembangunan pemerintah belum diarahkan secara maksimal ke sektor-sektor yang diperkirakan mampu menyediakan kesempatan kerja atau menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Demikian pula dengan perluasan usaha lebih mengarah pada usaha yang bersifat padat modal yang dipengaruhi oleh teknologi yang tinggi sehingga kurang bisa menyerap tenaga kerja yang ada karena faktor pendidikan dan keterampilan yang tidak mendukung.

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat mengembangkan lapangan usaha yang padat karya dan mampu menyerap semua angkatan kerja yang ada sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran karena tingkat pengangguran yang tinggi pada suatu daerah dapat menimbulkan berbagai masalah tidak hanya bagi perekonomian akan tetapi dapat menimbulkan tindakan kriminal.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pembangunan pemerintah Kabupaten Barru periode 1992/1993-2002 secara umum menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Demikian pula dengan nilai PDRB-nya terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 1998/1999 sempat menurun drastis sebagai akibat dari krisis ekonomi multidimensional yang melanda bangsa Indonesia. Sementara perkembangan kesempatan kerja masih berfluktuasi dan tidak terjadi perubahan-perubahan yang berarti.
 2. Dari hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan (nyata) terhadap PDRB, di mana koefisien regresi pengeluaran pembangunan bertanda positif dan faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di luar model hanya sebesar 18,2%.
 3. Dari hasil analisis regresi 2SLS menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan mempunyai hubungan atau pengaruh yang relatif kecil dalam menciptakan kesempatan kerja melalui PDRB yang diketahui dari nilai koefisien determinasinya (R^2) hanya sebesar 34,5% sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan kesempatan kerja di luar model sebesar
-

65,5%. Sedangkan model hasil analisisnya tidak sesuai dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya karena koefisien regresi variabel independen (PDRB/Y) bertanda negatif yang berarti bahwa pengeluaran pembangunan melalui PDRB mempunyai hubungan atau pengaruh yang negatif dalam menciptakan kesempatan kerja di Kabupaten Barru.

6.2. Saran-saran

1. Kenyataan membuktikan bahwa peranan pemerintah kabupaten Barru cukup besar dalam mendorong laju perkembangan PDRB. Oleh karena itu, pemerintah harus jeli dan mampu memilah sektor-sektor pengeluaran pemerintah yang mempunyai sumbangsih tinggi terhadap PDRB dan dapat memacu perluasan kesempatan kerja untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesempatan kerja/pengangguran agar tercipta stabilitas ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, karena peranan pemerintah daerah sangat penting dalam memfasilitasi kemungkinan terjadinya perkembangan.
2. Kebijakan kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi dalam era pembangunan saat ini dengan laju angkatan kerja yang terus meningkat, maka yang diperlukan adalah investasi padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mampu memberikan sumbangan terhadap pembangunan daerah dan untuk negara secara keseluruhan. Untuk itu, kiranya

pemerintah lebih memperhatikan lagi sektor yang berkaitan dengan pengembangan SDM ini, karena SDM yang dibangun hari ini menentukan nasib bangsa ke depan.

3. Penelitian lanjutan hendaknya dilakukan untuk menemukenali sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan peluang kesempatan kerja yang lebih besar khususnya di Kabupaten Barru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin D. Laly. 1991. *Pengeluaran Pemerintah Dan Penerimaan Pajak Di Indonesia: 1974/1975-1988/1989*. Tidak Dipublikasikan. Fakultas Fasca Sarjana Unhas . Ujung Pandang.
- Ananta dan Priyono Tjiptoherijanto.1988. *Masalah-Masalah Penyerapan Tenaga Kerja Di Dalam Beberapa Skenario Ketenagakerjaan Indonesia*. Lembaga Demografi Fakultas Universitas Indonesia.
- Anonym.1994. *Rangkuman Indikator-Indikator Makroekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Jakarta
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri Ed.1 Cet. Ke-1*. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- BPS Kabupaten Barru, *Kabupaten Barru dalam Angka*. Berbagai edisi
----- *PDRB Kabupaten Barru*. Berbagai Edisi
- BPS Sulawesi Selatan. *Survei Sosial dan Ekonomi Nasional*. Berbagai Edisi
- Nanga, Muana.2001. *Makroekonomi ; Teori, Masalah Dan Kebijakan*. P.T Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subri, Mulyadi .2003.*Ekonomi Sumber Daya Manusia*.Ed.1.Cet.1.Pt Raja Grafindo Persada; Jakarta ✓
- Sukirno, Sadono.2000. *Teori Ekonomi Makro*.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
----- 1985. *Ekonomi Pembangunan*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Simanjuntak, J. Payaman 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*.Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ; Jakarta ✓
- Suparmoko, M. 1999. *Keuangan Negara : Teori Dan Praktek*. BPFE; Yogyakarta.
----- 2002. *Ekonomi Publik; Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
-

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Baru

Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, Widaya. 1995. *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Jakarta

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997. 1997 Sinar Grafika. Jakarta

Widodo, T. Suseno. 1990. *Indikator Ekonomi*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.

Lampiran 2

**Hasil Analisis 2SLS (Two Stage Least Square) dengan menggunakan program
Eviews ver 3.1**

Estimation Command:

TSLS Z C LOG(Y)

Estimation Equation:

$Z = C(1) + C(2)*LOG(Y)$

Substituted Coefficients:

$Z = 81609.03357 - 1871.554341*LOG(Y)$

Dependent Variable: Z

Method: Two-Stage Least Squares

Date: 02/22/05 Time: 12:39

Sample: 1993 2003

Included observations: 11

Instrument list: Y C LOG(GMIN1)

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81609.03	14249.20	5.727269	0.0003
LOG(Y)	-1871.554	870.9354	-2.148901	0.0601
R-squared	0.345090	Mean dependent var		51017.27
Adjusted R-squared	0.272322	S.D. dependent var		2384.471
S.E. of regression	2034.050	Sum squared resid		37236251
F-statistic	4.617777	Durbin-Watson stat		1.895634
Prob(F-statistic)	0.060144			

Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Barru Menurut Sektor Tahun 1992-2002

Pengeluaran Pembangunan	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Industri	2500	70003	14000	30750	38000	19000	40500	20000	27140	58800	180047,5
Pertanian Dan Kehutanan	290061	552910	516200	649497	770045	689104	898274	2014306,4	1465812,72	1388528,567	15903090,5
Sumber Daya Air Dan Irigasi	0	0	0	0	0	0	0	0	509270	150000	1502222
Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	106625
Pergangan, Pengembangan Usaha	76167	120504	131200	140230	476064	1329920	1512207	711178,77	295576	6700802	2022765,235
Transportasi	0	0	0	0	0	4824609	2383887	5872620,81	8274175,26	12087111,8	18936773,82
Perumahan Dan Energi	55000	39944	52548	60080	25000	0	0	65000	175000	324999,25	160000
Pariwisata Dan Telekomunikasi	2794707	4293801	3664549	3065720	4332257	0	0	78200	234195,4	17340	864480
Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	405160	190391	1657069	701459	1014840	2124092	2101303	319804,68	555045,32	2082603,281	1624300,5
Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	489251	288096	562455	253947	381889	197802	154084	1976210,5	787127,5	806418	1497065,5
Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Keresiyatan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1380001	2201595	1118429	803406	1003347	1420459	1500857	1558017,19	1191804,08	2855114,817	3994192,125
Kepembelahan Dan Keluarga Sejahtera	0	0	0	0	0	150	10000	0	13000	10000	95000
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita Dan Anak Remaja	166870	562124	227275	241380	642448	1108634	886337	423988,38	1440212,14	1259771,128	1912881,312
Perubahan Dan Pemukiman	10000	0	58194	0	22100	0	303121	929477,00	2247694,14	2996586,452	1839747,975
Agama	4322	2035	62051	164366	86190	71000	70000	76244,45	69355	133450	1359481
Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	68124	67500	47500	155709	144974	423348	10000	148500	239200	299521	608924
Hukum	4500	4000	3000	10000	8872	4910	4108	49375	45000	100000	197949,5
Aparatur Pemerintah Dan Pegawai	108236	333158	403565	1267344	1310158	1624632	488432	327971,41	1089457,83	2004295,062	4108047,99
Pratik, Penerangan, Komunikasi Dan Media Massa	1500	4545	15900	24000	15500	30000	45275	6713,42	27500	386302	76500
Kecamatan Dan Keterlibatan Ummat	0	2700	6000	8600	71500	12500	10000	134285,2	55000	165500	343850
Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	5859499	8771366	7944733	7513898	10163184	13878760	16476845	14711893	18750565,4	33852147,66	43118823,95

Lampiran 4

PDRB Kabupaten Barru Tahun 1993-2003 Atas Dasar Harga Konstan 1993

PDRB Atas Dasar Harga Konstan	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004
Pertanian	68544,94	68606,88	71408,3	74562,45	76970,85	75146,42	75075,7	74828,42	72680,12	75092,71	76036,89
Pertambangan Dan Galian	1256,2	1308	1394,89	1582,8	1756,08	1385,49	1642,51	1506,51	1628,54	1762,41	1875,03
Industri Pengolahan	5332,19	5588,64	5858,15	6400,07	7080,53	8121,73	7954,12	7531,99	8632,59	9484,16	9617,5
Listrik, Gas Dan Air	852,81	1032,44	1043,35	1116,05	1215,67	1304,94	1370,65	1349,67	1374,29	1421,05	1446,67
Bangunan	8708,27	9141,95	9725,45	10400,45	10991,2	8711,1	9422,63	9982,6	11247,38	11990,23	13196,45
Perdagangan, Restoran Dan Hotel	17949,43	15066,96	20374,31	21816,34	23351,97	23516,34	24951,85	26315,97	28288,32	29787,36	31055,31
Angkutan Dan Komunikasi	7005,77	7354,08	7787,23	8792,58	9536,54	8648,24	9738,46	9809,6	10808,47	11278,56	12184,38
Bank Dan Lembaga Keuangan	6754,14	6033,35	6888,2	7496,1	7642,07	6296,53	6580,9	6798,15	6948,79	7138,93	9995,2
Jasa-Jasa	16420,01	17545,1	19053,85	19973,01	21337,71	19202,14	19902,24	19992,84	23744,73	24621,83	26197,84
Total	132823,76	136577,4	143533,7	152139,85	159882,62	150332,93	156639,06	158115,75	163363,23	172577,24	181605,27

**Penduduk Kabupaten Barru Yang Bekerja
Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 1993-2003**

Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja				Total
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Jumlah	Sekolah	Menugurus Rumah Tangga	Lainnya	
1993	48267	4974	53241	19702	32482	11358	116783
1994	55453	5625	61078	21002	29678	10564	122322
1995	52900	7642	60542	19640	30928	10220	121330
1996	51364	2690	54054	20806	33032	11066	118958
1997	47415	3597	51012	22968	35949	11694	121623
1998	50473	5676	56149	20589	36521	9759	123018
1999	52390	3610	56000	22004	36822	8001	122827
2000	48385	1515	49900	15650	41640	14969	122159
2001	50985	3740	54725	20605	38295	7015	120640
2002	50616	4146	54762	20832	36096	9555	121245
2003	55597	3818	59415	17533	39148	10536	126632

**Jumlah Penduduk Kabupaten Barru yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003**

Tahun	Pertanian	Pertambangan Dan Galian	Industri	Listrik Dan Gas	Konstruksi	Perdagangan	Komunikasi	Keuangan	Jasa	Lainnya	Total
1993	31560	102	1933	0	851	5042	1439	0	7340	0	48267
1994	33855		2332	153	865	7445	1120	0	9326	102	55453
1995	31704	572	4008	156	1016	6148	1784	52	7460	0	52900
1996	27876	290	1378	172	984	8850	1942	58	9756	58	51364
1997	28164	204	1071	183	795	4752	2376	51	9381	438	47415
1998	29907	127	2039	127	1280	5544	2171	128	9150	0	50473
1999	28878	0	2395	149	1336	8287	2869	0	8419	57	52390
2000	29916	138	1921	118	1031	6277	2310	92	6602	0	48385
2001	26845	110	2200	55	1390	10295	2860	110	7120	0	50985
2002	29283	480	2490	0	891	7041	3000	174	7257	0	50616
2003	51213	487	2001	61	848	8405	3633	60	6234	0	52942

Lampiran 7

Perkembangan Pengeluaran Pembangunan

Tahun	Pengeluaran Pembangunan	Perkembangan
1992/1993	5859499,00	
1993/1994	8771306,00	49,69
1994/1995	7944733,00	-9,42
1995/1996	7515898,00	-5,40
1996/1997	10366184,00	37,92
1997/1998	13878760,00	33,88
1998/1999	10476845,00	-24,51
1999/2000	14711893,04	40,42
2000/2001	18750565,39	27,45
2001/2002	33852143,66	80,54
2002/2003	43118823,95	27,37

Perkembangan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi)

Tahun	PDRB	Perkembangan
1993/1994	132823,8	2,83
1994/1995	136580,4	5,07
1995/1996	143503,7	6,02
1996/1997	152140,1	5,09
1997/1998	159882,6	-5,97
1998/1999	150332,9	4,19
1999/2000	156639,1	0,94
2000/2001	158115,8	4,58
2001/2002	165363,2	4,36
2002/2003	172577,2	5,23
2003/2004	181605,3	

Perkembangan Kesempatan Kerja

Tahun	Kesempatan Kerja	Perkembangan
1993/1994	48267	14,89
1994/1995	55453	-4,60
1995/1996	52900	-2,90
1996/1997	51364	-7,69
1997/1998	47415	6,45
1998/1999	50473	3,80
1999/2000	52390	-7,64
2000/2001	48385	5,37
2001/2002	50985	-0,72
2002/2003	50616	4,60
2003/2004	52942	

Lampiran 8

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru
Menurut Sektor Tahun 2001-2003

Lapangan Usaha	2001	2002	2003
1. Pertanian	-2,87	3,32	0,81
2. Pertambangan dan Penggalian	8,10	8,22	6,60
3. Industri Pengolahan	14,61	9,86	3,70
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,82	3,40	2,10
5. Bangunan	12,77	6,51	8,96
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,49	5,30	5,72
7. Angkutan dan Komunikasi	10,18	4,35	7,18
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,22	2,74	12,31
9. Jasa-jasa	18,77	3,69	6,59
PDRB	4,58	4,36	5,23

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Barru Tahun 1999-2003

Tahun	Pertumbuhan PDRB (%)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
1999	11,71	4,20
2000	3,93	0,94
2001	14,01	4,58
2002	15,16	4,36
2003	12,27	5,23
Rata-rata	11,41	3,86

Lampiran 9

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Barru Menurut Lapangan Usaha Tahun 1999-2003. Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (%)

Lapangan Usaha	1999	2003
1. Pertanian	48,28	41,87
2. Pertambangan dan Penggalian	1,05	1,03
3. Industri Pengolahan	5,08	5,30
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,87	0,80
5. Bangunan	6,02	7,27
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,93	17,10
7. Angkutan dan Komunikasi	6,22	6,71
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,86	5,50
9. Jasa-Jasa	12,71	14,43
Total	100,00	100,00

Presentase Pekerja Di Kabupaten Barru Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

Lapangan Usaha	1993	2001	2003
1. Pertanian	65,39	52,65	58,96
2. Pertambangan dan Penggalian	0,21	0,22	0,92
3. Industri Pengolahan	4,00	4,31	3,78
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0	0,11	0,12
5. Bangunan	1,76	2,73	1,60
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,45	20,19	15,88
7. Angkutan dan Komunikasi	2,98	5,61	6,86
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0	0,22	0,11
9. Jasa-jasa	15,21	13,96	11,78
Total	100,00	100,00	100,00